

Warta

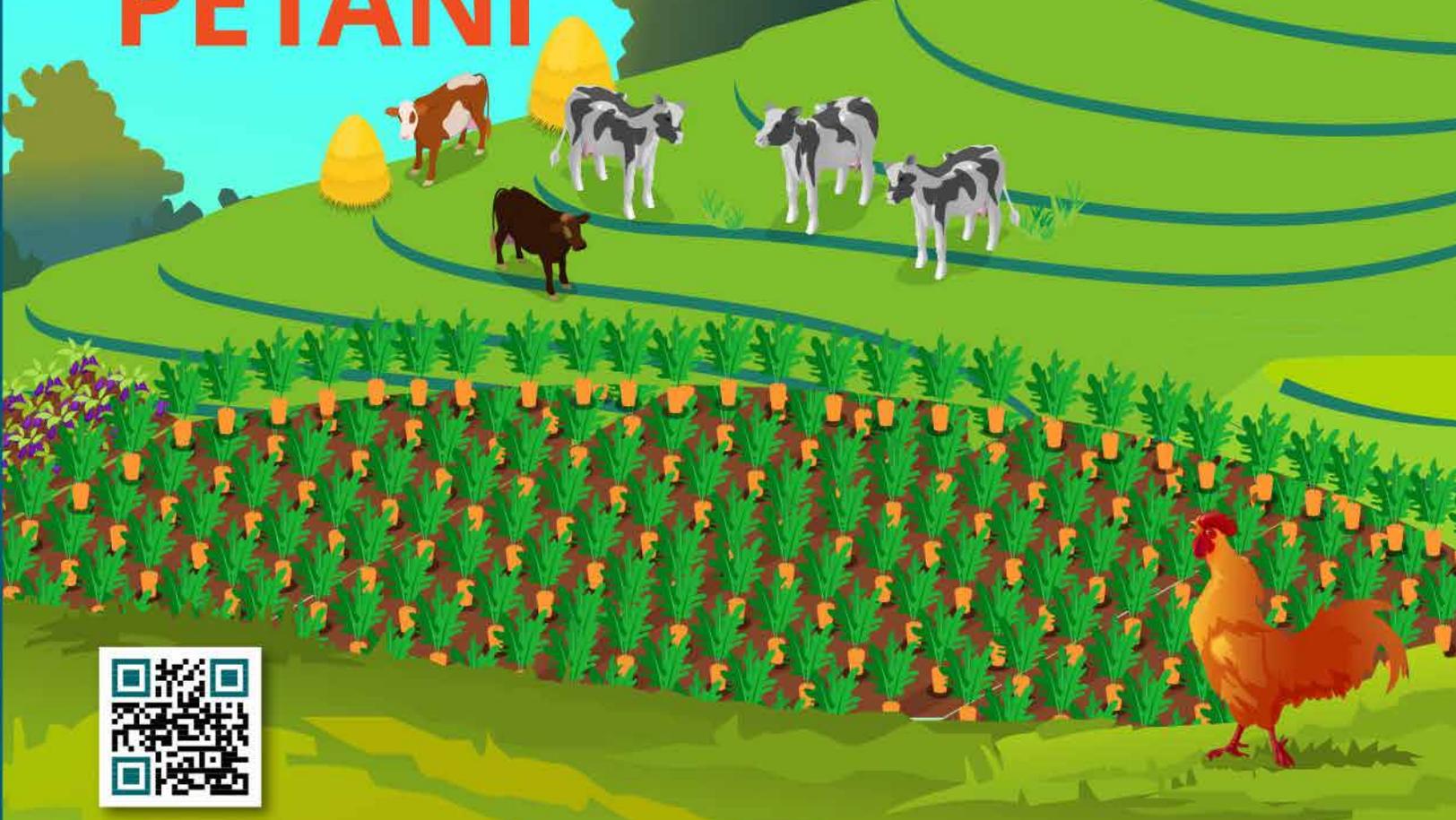
# PERTANIAN

VOLUME XXVI/EDISI FEBRUARI 2021

Menuju Kedaulatan Pangan

PROGRAM FOOD ESTATE  
BUAHKAN HASIL

## PANEN RAYA DAN SENYUM PETANI



**PENGARAH:**

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian

**PENANGGUNG JAWAB:**

Kepala Biro Humas  
dan Informasi Publik

**PENYUNTING:**

Drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si

**REDAKSI PELAKSANA:**

Abiyadun, SE, MM

**ANGGOTA REDAKSI:**

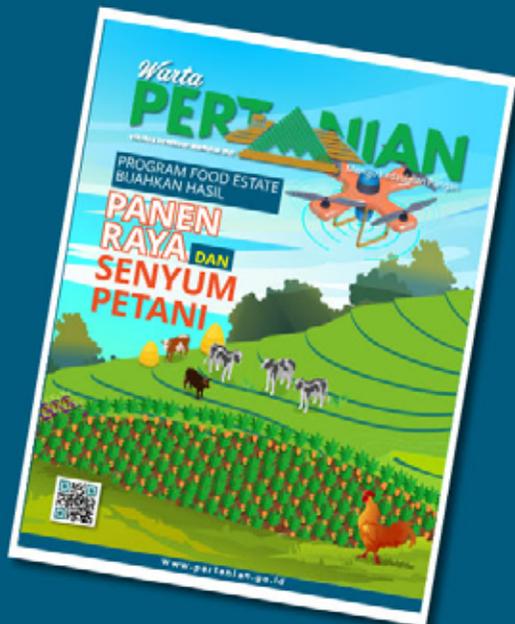
Dra. Ria Satiti

Imam Santoso, SE

Alice Raga Dewi, S.Sos

Hendrayani Yacub, S.Sos

Makmur, SE



Isi diluar tanggungjawab percetakan

Dilarang mengutip tanpa izin

**Majalah Warta Pertanian**

*Salam Redaksi*

# KERJA KERAS TAK SIA-SIA



**KERJA** keras para petani dibantu Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjawab adanya tuduhan sumir yang menganggap Program Food Estate belum berhasil.

Para petani mengaku puas dengan program pemerintah dan merasakan hasil jerih payahnya tidak sia-sia. Taufik, petani di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) mampu memperoleh hasil sekitar 6,4 ton per hectare (ha).

Watinah, 39, hasil produksi pertaniannya berpotensi hingga enam ton per ha. Wasis Haryanto, petani dari Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Belanti Siam hasil panennya mencapai 5,1 ton per ha yang menggunakan varietas Inpari 42, dan sebagian akan digunakan untuk benih.

Warji, 63, petani lainnya lagi dari Desa Belanti Siam menceritakan bahwa selama menanam padi di Belanti Siam, ia belum pernah mengalami gagal panen.

Kepala Desa Gedabung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng Suprpto, mengatakan, para petani di desanya justru akan segera menggelar panen raya pada minggu kedua dan ketiga Februari 2021, dengan produksi mencapai kurang lebih enam ton per ha.

Kepala Desa Belanti Siam, Amin Arifin yang juga menyayangkan berkembangnya isu gagal panen yang beredar beberapa hari lalu. Kata Amin, tidak ada gagal panen selama Program Food Estate Kalteng dikelola dengan baik yang melibatkan semua pihak, termasuk para petani dan jajaran desa.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) juga optimistis terhadap Program Food Estate, meskipun terjadi dinamika di lapangan. Lahannya sangat dinamis, tidak seperti di Jawa, Sumatera atau Sulawesi. Di Kalteng lahan rawa, kontur tanahnya ada yang dalam, sedang, datar, dan cukup bagus. Oleh karena itu, dinamika lapangan juga ada.

Penggunaan teknologi menjadi salah satu dasar optimistis itu. Dalam program ini penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan meningkatkan produksi pertanian.

Saat menghadiri Rapat Kerja DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021) siang, Mentan juga mengatakan, pengembangan Food Estate di Kalteng direncanakan seluas 30.000 ha. Khusus untuk Kabupaten Pulang Pisau, areal yang sudah ada seluas 10.000 ha. Hingga saat ini telah dilaksanakan olah tanah seluas 9.837 ha, dan yang sudah ditanam seluas 8.838 ha.

Di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut), Program Food Estate yang berbasis komoditas hortikultura juga mulai menampakkan hasilnya. Terdapat sekitar 215 ha areal yang sudah dikembangkan, ditanami bawang merah, bawang putih dan kentang.

Sementara Program Food Estate di Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur (NTT) diharapkan mampu menopang roda ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Welly, perwakilan Kelompok Tani Makatakeri menyambut baik upaya dan kerja keras pemerintah dalam memperbaiki kehidupan petani Sumba Tengah. Karena itu, ia mengajak seluruh petani agar mengoptimalkan lagi semua lahan yang tersedia. (\*)



5



16



29



35



48

4

Dengan wajah sumringah, Watinah, 39, merasa senang bukan kepalang. Sebab, hasil produksi pertaniannya berpotensi hingga enam ton per hektare (ha). Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang garapan sawah sebelum intervensi pemerintah melalui Program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).

13

Sementara itu, Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut) yang berbasis komoditas hortikultura sudah mulai menampakkan hasilnya. Terdapat sekitar 215 hektare (ha) areal yang sudah dikembangkan, ditanami bawang merah, bawang putih dan kentang.

29

Pemerintah saat ini berupaya melakukan pengembangan kawasan perdesaan dengan berbagai pendekatan guna terwujudnya transformasi ekonomi desa. Salah satunya dengan membangun korporasi pertanian.

30

Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada Kuartal IV 2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy).

41

Di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat Pandemi Covid-19, sektor pertanian kembali menunjukkan keperkasaannya.

46

Seiring membaiknya sektor pertanian di tengah Pandemi Covid-19, ekspor dalam negeri juga semakin meningkat.

PROGRAM FOOD ESTATE BUAHKAN HASIL

# PANEN RAYA

DAN

# SENYUM PETANI

DENGAN wajah sumringah, Watinah, 39, merasa senang bukan kepalang. Sebab, hasil produksi pertaniannya berpotensi hingga enam ton per hektare (ha). Angka tersebut jauh lebih besar ketimbang garapan sawah sebelum intervensi pemerintah melalui Program Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng).



”Kita memang akan melakukan tambahan-tambahan untuk terus membenahi apa yang ada di sana. Food Estate bisa menjadi jawaban, sehingga cadangan (pangan, red) kita bisa terpenuhi,”

**Syahrul Yasin Limpo**

*Menteri Pertanian RI*



***Program jangka panjang Food Estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) membuahkan hasil. Kesuksesan ini berkat kerja keras pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan petani dalam mengelola lahan pertanian di kawasan Food Estate.***

“Program Food Estate mengubah cara bertani model lama, untuk kemudian menerapkan pertanian model baru. Alhamdulillah hasilnya bisa enam ton per ha,” ujrnnya di area Food Estate Blok B Desa Gadabung, Pulang Pisau, Kalteng, Kamis (4/2/2021).

Menurut Watinah, Program Food Estate memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan

kesejahteraan. Peluang tersebut bisa dilihat dari tingginya jumlah produksi, sampai penggunaan teknologi dan mekanisasi. “Peluangnya sangat besar sekali karena benih yang ditanam adalah benih unggul,” katanya.

Saat ini, Watinah bersama sang suami mengelola tujuh ha sawah dan satu ha tanaman kebun. Semuanya dikerjakan



Watinah dengan alat mesin pertanian (alsintan) seperti penggunaan mesin panen (combine harvester) dan mesin pencacah padi lainnya. "Kalau bibit kita gunakan hibrida, tapi kalau garapan sawah kita gunakan mesin-mesin canggih," tandasnya.

Taufik, petani lainnya di Desa Belanti Siam mampu memperoleh hasil sekitar 6,4 ton per ha. "Varietas yang kami tanam Inpari 42 dan alhamdulillah hasilnya meningkat daripada kemarin. Hasil panen ini juga siap kami gunakan sebagai benih" ungkapnya.

Taufik sendiri tergabung dalam Kelompok Tani Karya Makmur dengan total lahan yang digarap mencapai 100 ha.

Wasis Haryanto, petani dari Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Belanti Siam mengungkapkan bahwa dengan mengikuti Program Food Estate ini hasil panennya mencapai 5,1 ton per ha yang menggunakan varietas Inpari 42, dan sebagian akan digunakan untuk benih.

Petani berusia 35 tahun itu juga berharap pemerintah terus memberikan pendampingan pada para petani di wilayahnya. "Saya senang dengan adanya Program Food Estate ini, dan kami ingin terus didampingi supaya hasilnya bisa lebih baik," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Desa Belanti Siam, Mujiyanto mengatakan, saat ini lahan Food Estate sudah memasuki masa panen. Usai panen, para petani akan segera masuk masa tanam kembali.

"Bulan-bulan ini di kelompok kami dari 60 anggota siap panen, program dari Pak Presiden berhasil dan membuat kami merasa puas," katanya di Belanti Siam,

Rabu (3/2/2021).

Mujiyanto mengakui dari pendampingan yang dilakukan Program Food Estate di daerahnya tersebut mendapatkan kenaikan dari provitas hasil produksi.

"Untuk di kelompok saya ini hasilnya sudah meningkat lebih banyak satu sampai dua ton tiap hektare yang diusahakan, dari sebelumnya bisa mendapatkan rata-rata tiga sampai empat ton, sekarang sampai lima sampai enam ton," ucapnya bangga.

Untuk selanjutnya, Mujiyanto hanya menyarankan pemerintah juga mendengarkan masukan petani, terkait pengaturan waktu tanam, mengingat kondisi alam di wilayah Belanti Siam sedikit berbeda. "Saya yakin akan lebih baik lagi hasilnya kelak, kami paham kondisi alamnya, pemerintah tinggal mendukung kami," tambahnya.

Terkait dengan hasil panen, Mujiyanto mengatakan, beberapa petani sudah mendulang sukses dengan membeli alsintan sebagai bagian dari kemandirian. "Jadi tidak betul kalau dikatakan Food Estate gagal panen. Justru para petani mendulang sukses dengan membeli alsintan. Terus terang kami sangat terbantu dengan berbagai bantuan pemerintah, termasuk penyediaan bibit unggul Inpara 42," ujarnya, Rabu (3/2/2021).

Mujiyanto menegaskan bahwa tidak ada gagal panen dalam area Food Estate di Kalteng. Yang ada hanya penurunan produksi yang diakibatkan faktor alam seperti hujan dan angin kencang yang membuat tanaman





padi siap panen rebah dan basah.

“Kalau sudah basah mau tidak mau harus dipanen. Itulah yang disebut penurunan produksi, bukan berarti gagal panen. Toh juga tidak banyak, hanya lima persen dari total lahan 2.200 ha Desa Belanti Siam,” katanya.

Warji (63 tahun), petani lainnya lagi dari Desa Belanti Siam, Kecamatan Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau menceritakan bahwa selama menanam padi di Belanti Siam, ia belum pernah mengalami gagal panen.

“Pokoknya ikuti panduan cara tanam. Memang banyak caranya, harus ini, tanah diolah dulu, obat juga banyak. Tapi hasil panen maksimal,” ungkapnya saat ditemui di areal persawahan miliknya, Rabu (10/2/2021).

Sudah 20 tahun Warji menjadi Petani di Belanti Siam. Sebelumnya, pada 1979, ia bersama pemuda-pemuda lainnya asal Blitar mengikuti Program Transmigrasi. Barulah setahun berikutnya, ia ditempatkan di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).

“Waktu peristiwa Sampit, pada 2002, saya justru pindah dari Banyuasin ke sini. Kebetulan orang tua saya juga trans,” katanya.

Menurut Warji, menjadi petani itu tenang, asalkan lahan yang dikelolanya tidak sedikit. Kini, Warji memiliki sawah dengan luas enam ha yang semula hanya dua ha. “Kalau lahan garapannya sedikit, itu pas masuk panen selalu was-was. Tapi, kalau empat ha sampai enam hektar, ibaratnya kita gajian per bulannya ada. Minim 10 juta dibawa pulang setelah bayar-bayar pengeluaran,” terangnya.

Kepala Desa Gedabung, Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng Suprpto menegaskan, seluruh area Food Estate yang masuk wilayah desanya, saat ini dalam

kondisi siap panen. Dia juga menepis isu gagal panen yang beredar melalui pemberitaan media beberapa waktu lalu.

“Jadi tidak ada penurunan apalagi kegagalan. Belum panen kok dikatakan gagal kan lucu. Dan kalau lihat di lapangan tidak ada potensi gagal panen. Anda bisa lihat sendiri,” ujar Suprpto ketika ditemui di Blok D Kanan Jalur 2 Food Estate Pulang Pisau, Rabu (3/2/2021).

Menurut Suprpto, para petani di sesanya justru akan segera menggelar panen raya pada minggu kedua dan ketiga Februari 2021, dengan produksi mencapai kurang lebih enam ton per ha.

“Perkiraan kami produksinya enam ton untuk satu hektare. Karena itu, kami mewakili masyarakat Desa Gadabung mengucapkan terima kasih atas adanya Program Food Estate ini. Sebab saya yakin program ini menjadikan desa kita lebih baik dan sejahtera,” katanya.

Suprpto berharap Desa Gadabung mampu memberi kontribusi besar terhadap jalannya pembangunan pertanian nasional, utamanya dalam memenuhi kebutuhan pangan di Kalimantan melalui Program Food Estate. “Saya berharap Kalteng bisa menghasilkan beras unggul dan berkualitas untuk menopang pangan nasional,” katanya.

Saat ini, lanjut Suprpto, setidaknya 1.212 ha areal Food Estate Desa Gadabung dalam kondisi siap panen dengan menggunakan varietas benih Impara.

Senada dengan Kepala Desa Belanti Siam, Amin Arifin yang juga menyayangkan berkembangnya isu gagal panen yang beredar beberapa hari lalu. Kata Amin, tidak ada gagal panen selama Program Food Estate Kalteng dikelola dengan baik yang melibatkan semua pihak, termasuk para petani dan jajaran desa.



“Saya kembali lagi mengklarifikasi bahwa sekarang ini ada berita yang beredar bahwa Food Estate wilayah kami dinyatakan gagal panen. Itu tidak benar. Tak ada potensi gagal panen di sini,” tandasnya.

“Bisa dilihat secara langsung di sini, dengan hamparan padi menguning ini, dan memang juga sudah ada yang mendahului panen. Hasilnya kemarin menggunakan alat bisa lima sampai enam ton. Jadi kalau di sini gagal panen itu tidak benar,” ungkap Arifin.

Edi Subairi, petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Desa Belanti Siam menambahkan bahwa di Belanti Siam total lahan yang ada mencapai 1.000 ha dengan hasil yang sangat memuaskan, rata-rata 5,5-5,6 ton per ha. “Memang ada di beberapa titik hasil kurang memuaskan, karena faktor iklim, yaitu padi roboh, sehingga petani panen di awal dan hasil tidak maksimal,” tambahnya.

## Tetap Optimistis

Pada beberapa kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) optimistis terhadap Program Food Estate, meskipun terjadi dinamika di lapangan. “Ini lahan yang sangat dinamis, tidak seperti di Jawa, Sumatera atau Sulawesi. Di sini lahan rawa, kontur tanahnya ada yang dalam, sedang, datar, dan cukup bagus. Oleh karena itu, dinamika lapangan juga ada,” ungkapnya saat meninjau lokasi, Rabu (16/12/2020).

Penggunaan teknologi menjadi salah satu dasar optimistis itu. Mentan SYL juga mengungkapkan bahwa dalam program ini penerapan mekanisasi serta teknologi pertanian diharapkan dapat mengoptimalkan rawa menjadi lahan pertanian produktif dan

meningkatkan produksi pertanian.

Saat menghadiri Rapat Kerja DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021) siang, Mentan juga mengatakan, pengembangan Food Estate di Kalteng direncanakan seluas 30.000 h. Khusus untuk Kabupaten Pulang Pisau, areal yang sudah ada seluas 10.000 ha. Hingga saat ini telah dilaksanakan olah tanah seluas 9.837 ha, dan yang sudah ditanam seluas 8.838 ha.

Syahrul menyebutkan, Food Estate di Kalteng memang berbeda dengan kawasan lain seperti Aceh maupun Jawa. Mayoritas kawasan Food Estate berupa lahan rawa, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Tapi Syahrul membantah jika program ini disebut gagal. “Mana bisa disebut gagal kalau panen saja baru mau dimulai,” tegasnya.

Di depan Anggota Komisi IV DPR RI, SYL berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan Food Estate sebagai upaya memenuhi cadangan pangan nasional. Food and Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan Dunia pada awal Pandemi Covid-19 mengingatkan potensi krisis pangan yang bisa melanda dunia.

“Kita memang akan melakukan tambahan-tambahan untuk terus membenahi apa yang ada di sana. Food Estate bisa menjadi jawaban, sehingga cadangan (pangan, red) kita bisa terpenuhi,” tandasnya.

Food Estate yang saat ini dikembangkan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama sejumlah kementerian/lembaga (K/L) lain berbasis korporasi pertanian. Dengan konsep ini, pemerintah bisa lebih mudah memfasilitasi bantuan pembiayaan maupun memasifkan mekanisasi.

"Kalau kita korporasikan, kita bisa melakukan intervensi KUR (Kredit Usaha Rakyat). Di sini tidak single commodity, tapi kita juga bawa komoditas perkebunan dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Sarwo Edhy menegaskan bahwa Program Nasional Food Estate di Pulang Pisau, Kalteng sudah berjalan dengan baik. Bahkan, tahun ini terjadi panen raya pada Minggu ketiga Februari. "Ini menandakan bahwa Program Food Estate berhasil dijalankan," ujar Sarwo saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (2/2/2021).

Sarwo Edhy mengatakan, luas lahan yang ada di Pulang Pisau untuk Food Estate saat ini mencapai 10 ribu ha dan yang berhasil ditanami sekitar 9,7 ribu ha. Ia menyampaikan 300 ha yang belum ditanami disebabkan oleh tradisi masyarakat yang memulai menanam pada Maret.

"Provititas hasil panen yang diperoleh bisa mencapai 6,4 ton per ha yang biasanya hanya tiga sampai empat ton per ha," tandasnya.

Kepala Balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) Fadry Djufry menyampaikan, sejak awal dimulainya Program Food Estate, Balitbangtan telah menerjunkan tim terbaiknya dalam melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi dan melakukan pendampingan baik kepada pemerintah daerah setempat ataupun langsung kepada petani.

"Food Estate adalah program super prioritas, di sini kami juga telah membangun center of excellent, yaitu model ideal Food Estate yang sesuai dengan kondisi petani serta peluang industri. Lokasi tersebut yang

akan menjadi pusat percontohan bagi kawasan di sekitarnya." ujarnya.

Fadry menyatakan, pihaknya sudah menerapkan teknologi budidaya Rawa Intensif, Super dan Aktual (RAISA) yang dapat mendukung produksi padi pada lahan dengan kandungan zat besi dan natrium yang tinggi.

"Dengan aplikasi teknologi ini akan dapat meningkatkan produktivitas padi serta diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200 atau bahkan IP 300 dalam setahun," lanjutnya.

Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalteng Syamsuddin mengatakan, rata-rata hasil panen mendapatkan 4-6 ton per ha. "Kami sudah melihat kondisi lahan dan pertanaman," ujarnya saat ditemui di lokasi Food Estate, Sabtu (30/1/2021).

Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan kepada petani, sehingga seluruh wilayah yang menjadi lokasi Food Estate dapat mencapai hasil yang maksimal.

"Kami akan terus mengawal dan memberikan pendampingan sesuai rekomendasi tim, seperti perlakuan lahan, cara tanam dan budidaya sehingga hasil dari pertanaman dapat optimal," ujarnya.

Syamsuddin menambahkan, pemilihan varietas yang ditanam di lokasi tersebut adalah preferensi dari para petani, seperti varietas Inpari 32 dan Inpari 42 yang sudah cukup lama dikenal dan ditanam para petani di wilayah tersebut. "Varietas tersebut menjadi



primadona karena memiliki rendemen beras tinggi dan saat ini harga gabah konsumsi mencapai Rp5.300 per kg," ujarnya.

Terkait gerakan percepatan tanam, Syamsuddin menjelaskan bahwa hal tersebut sudah berdasarkan hasil kajian khususnya dalam hal kecukupan air. "Percepatan tanam karena air cukup, dan tanaman padi sangat memerlukan air," ucapnya.

Syamsuddin mengatakan, pengelolaan Food Estate dilakukan dengan intervensi teknologi. Sistem informasi pemantauan panen dan cuaca yang digunakan Kementan telah terhubung langsung dengan pusat data Agriculture War Room (AWR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani).

"Alhamdulillah kalau kita perhatikan dari database, sebelum program ini dimulai produksinya hanya 3,5-4 ton. Tapi setelah kita intervensi hasilnya rata-rata dapat mencapai lima sampai enam ton. Secara umum ini hasil yang sangat bagus," katanya.

Menurut Syamsuddin, di rumah petani sekitar lahan Food Estate pun ketertarikan petani untuk menggunakan alsintan (alat mesin pertanian) meningkat. Tak heran,

kini banyak alsintan muncul di halaman rumah petani di Belanti siam maupun Gedabung.

"Hebatnya mereka memiliki sendiri. Ada yang dibantu KUR (Kredit Usaha Rakyat), ada juga yang beli langsung. Ini tanda pertanian modern dan maju mulai diadaptasi dengan baik di sini," paparnya.

Terkait robohnya tanaman padi di beberapa titik, Syamsuddin menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada petani untuk melakukan tanam pindah yang dapat memperkuat perakaran tanaman, sehingga memperkecil kemungkinan roboh. "Tapi beberapa masih terbiasa dengan cara tanam tabor, sehingga tanaman tidak mampu menahan terpaan angin, sehingga tanaman roboh dan panen harus dipercepat," ujarnya.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meninjau area tanaman padi siap panen di lokasi Food Estate, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (2/2/2021). Gubernur yang didampingi Kapolda dan Komandan Korem itu melihat langsung pengerjaan dan perkembangan lumbung pangan Food estate dari waktu ke waktu.



“Kami bersama Kapolda dan Danrem berharap agar area Food Estate ini mampu menjadi lumbung pangan nasional. Karena itu, seluruh jajaran pemkab (pemerintah kabupaten) dan jajaran terkait berupaya meningkatkan dan menguatkan pentingnya program nasional food ini,” ujar Sugianto.

Menurut dia, Program Food Estate merupakan program jangka panjang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Program ini juga diharapkan mampu menjadi lumbung pangan dunia serta mendongkrak nilai ekspor nasional, sehingga membuka lapangan kerja secara luas.

“Saya berharap pengembangan Food Estate di Kalteng dapat memberikan kualitas dan kuantitas terbaik, sehingga kebutuhan nasional dan ekspor mampu terpenuhi setiap saat,” katanya.

Kepala Dinas Hortikultura dan Peternakan Kalteng Sunarti mengatakan bahwa penurunan produksi hanya pada sebagian kecil lahan, dan sama sekali tidak mengurangi rata-rata produktifitas lahan yang mencapai diatas 5 ton per ha.

“Kalau saya bilang yang turun itu lebih kepada panen paksa, karena belum saatnya panen akibat roboh

diterpa angin dan hujan. Tapi ini masukan buat kami agar ke depan bisa kita antisipasi,” tandasnya.

Sunarti berharap para petani tetap melakukan produksi dengan mengedepankan pendekatan pola tanam modern melalui alsintan dan pendampingan petugas penyuluh.

“Kita akan dampingi terus para petani agar melakukan budidaya dengan cara yang modern. Misalnya, ke depan tidak lagi melakukan tabur benih dengan cara manual karena akan mempengaruhi pertumbuhan,” katanya.

Sunarti menambahkan, keunggulan Food Estate terdapat pada kolaborasi yang kuat antara petani, pemerintah, dan para pengusaha pertanian dalam menjaga lahan serta mencapai target yang ditetapkan.

“Kami di lapangan ini terus bekerja keras dalam rangka meningkatkan produksi Food Estate. Sehingga tidak mungkin rasanya area lumbung pangan ini mengalami gagal panen,” ujarnya saat meninjau area siap panen di Kabupaten Pulang Pisau, Kamis (4/2/2021).

Menurut Sunarti, narasi gagal panen sangat berlebihan, juga menyedihkan. Faktanya, banyak petani dan para pengusaha tani yang terus bergeliat mengambil untung



dari program jangka panjang yang digagaa Presiden Joko Widodo tersebut.

“Kalimat gagal panen itu tidak melihat persoalan secara utuh dan tidak mewakili luasan Food Estate yang mencapai 10 ribu ha. Memang ada yang menurun, tapi itu hanya sebagian kecil saja, dan penyebabnya adalah faktor cuaca seperti angin dan hujan,” katanya.

Makanya, kata Sunarti, ke depan jika terjadi kendala cuaca semacam ini sebaiknya para petani segera melaporkan kepada petugas penyuluh yang ada di lapangan. Bukan berarti, mengambil keputusan lalu membuat pernyataan.

“Agar hasilnya ke depan itu baik tentunya dalam pola budidayanya harus mengikuti pola yang sudah dianjurkan oleh para petugas kita. Kan gini, mungkin selama ini mereka masih melakukan budidaya dengan cara tabur benih yang bisa saja mempengaruhi pertumbuhannya, sehingga mudah roboh diterjang cuaca buruk,” katanya.

Adapun terkait pola tanam yang dilakukan, Sunarti mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu mendorong petani untuk melakukan tiga kali produksi dalam setahun. Pola tanam semacam itu dinilai memungkinkan karena benih yang digunakan merupakan benih unggul jenis Impara 42.

“Memang sebelumnya masyarakat sekitar sini budidaya tanamannya hanya dua kali dalam setahun, tapi kita dari pemerintah mendorong untuk menjadikan tiga kali dalam setahun. Kenapa? sebab benih yang digunakan adalah benih unggul,” tandasnya.

Sunarti juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian pemerintah pusat, terutama Kementan yang terus mendampingi dan membantu para petani dalam berproduksi.

“Kita akan dampingi terus para petani agar melakukan budidaya dengan cara yang modern. Misalnya, ke depan tidak lagi melakukan tabur benih dengan cara manual karena akan mempengaruhi pertumbuhan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Sunarna mengharapkan adanya progres yang baik dari Program Food Estate dari waktu ke waktu. Menurut dia, tidak hanya hasil panen saja yang menjadi perhatian, namun juga harus prosesnya harus berjalan dengan lancar.

“Yang pasti kami sangat mengharapkan progres dari Food Estate itu demi perkembangan pertanian kita ke depannya,” ujarnya. **(tim humas)**



Di Humbahas Mulai

# MENAMPAKKAN HASIL

**S**EMENTARA itu, Program Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut) yang berbasis komoditas hortikultura sudah mulai menampakkan hasilnya. Terdapat sekitar 215 hektare (ha) areal yang sudah dikembangkan, ditanami bawang merah, bawang putih dan kentang.

Salah satu kunci keberhasilan Program Food Estate ada pada kegigihan para petani yang berjuang bersama tim, baik dari Kementerian Pertanian (Kementan), pemerintah daerah (pemda) maupun pihak lain. Kerja keras mereka menjawab adanya tuduhan sumir yang menganggap Program Food Estate belum berhasil.

"Sah-sah saja orang bilang ini gagal total, tapi saya yang menanam di sini, tidak mau dibilang gagal. Beberapa

lahan memang ada yang tidak tumbuh maksimal. Meski demikian, coba lihat sendiri pertanaman yang saya miliki ini. Pertumbuhannya bagus, saya dan istri saya merawat setiap harinya. Lahan saya belum panen, makanya kalau dibilang gagal itu salah," ujar petani dari Kelompok Tani Ganda Mersada, Jhon Les Lumban Gaul saat ditemui di lahannya, Kamis (18/2/2021).

Jhon yang saat itu bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil menyebutkan tantangan terberatnya adalah cuaca termasuk saat perayaan natal dan tahun baru. Varietas batu ijo yang ditanam di lahannya sempat ditinggalkan beberapa hari karena fokus dengan perayaan keagamaan.

"Di sini kendala utamanya cuaca yang ekstrem. Pagi kadang hujan sampai sore dan kalau malam berkabut.





Keduanya, waktu petani yang tersedot pada saat perayaan natal tahun lalu. Saya akui sempat saya meninggalkan lahan, tapi kemudian usai perayaan, saya kembali menekuni lahan saya,” ungkapnya.

Petani berusia 50 tahun ini salut dengan Kementerian Pertanian. Bantuan yang ia terima sesuai dengan kebutuhan yang ada tanpa dikurangi dan ditutup-tutupi. Tidak hanya benih dan sarana produksi, dirinya bersama para petani lain sempat menerima upah kerja.

“Bantuan kepada kami itu tidak ada yang tersembunyi. Berapa yang dikasih ke kami, itulah yang kami terima. Mulai dari benih hingga sarana produksi kami terima penuh. Bahkan kami juga menerima upah kerja mulai saat penaburan kompos, pemasangan mulsa hingga waktu penanaman. Kami hanya tinggal merawatnya saja. Hasilnya pun bukan buat pemerintah, semua murni untuk kami para petani,” terang Jhon.

Kalau ada perbedaan pertumbuhan, dirinya menilai wajar karena itu kembali lagi ke petani yang menggarap. “Jika tumbuh dengan baik, berarti dirawat dengan bagus. Jika belum bagus berarti perawatannya perlu ditingkatkan lagi. Pada dasarnya bibit yang kami terima memang bagus. Jadi ya bagaimana perawatannya. Wajar juga karena kami di sini baru pertama kali tanam, pun arealnya sangat luas. Masih perlu belajar,” tandasnya.

Jhon juga mengingatkan bahwa hasil yang diterima bukan daun melainkan umbi yang hendak dipanen.

“Perlu diperhatikan juga, kami ini memanen umbinya. Bukan daunnya. Jadi jangan fokus dengan daun bawang yang harus besar atau kecil ukurannya. Berukuran kecil pun tetap ada umbinya. Kami ini fokus dengan pertumbuhan umbinya. Panen sebesar apapun, hasilnya jelas ada,” ujar Jhon semangat.

Terdapat petani muda berusia 30 tahun, Charles Sinaga yang mengaku perkembangan pertanaman miliknya

luar biasa. Pembukaan lahan pertanian yang tadinya hanya terdiri dari semak belukar dan kini tampak hijau mata memandang adalah berkat Program Food Estate yang didorong oleh Presiden Joko Widodo.

“Progresnya luar biasa. Bisa dilihat, kami diberi bantuan tanam di atas lahan yang tadinya tidur dan kini saya bisa menanamnya. Sangat bangga, kami petani muda di sini terdorong untuk menanam dengan gigih,” ujarnya.

Charles juga memaklumi, pertanaman tidak dimungkirkan bisa diharapkan semua bagus dalam sekali waktu apalagi ini tanam perdana. Jika ada yang menilai gagal, hal itu kembali ke persepsi masing-masing.

“Saya pribadi merasa wajar jika ada tanaman yang kurang bagus. Artinya ada yang kurang dalam pengaplikasiannya. Apalagi saya, belum pernah menanam sebelumnya, pun dalam jumlah luasan yang besar seperti ini. Di antara yang bagus pertumbuhannya, ada juga yang kurang bagus,” akunya.

Dengan perkiraan panen di awal Maret 2021, Charles meyakini hasil panennya akan bagus. Umbi bawang tumbuh dengan baik dan hal itu membuat dirinya bangga.

“Saya mau lihat hasil panen perdana dulu. Nanti di periode ke dua baru saya akan menargetkan hasil. Berapa kira-kira minimal tonase yang mau saya raih. Untuk sekarang saya fokus saya merawat tanamannya,” papar Charles.

Sebagai informasi, harga bawang merah rogol basah dijual Rp10 ribu per kg. Sementara bawang merah yang siap konsumsi, untuk yang berukuran besar Rp16 ribu per kg dan berukuran sedang Rp20 ribu. Harga bawang berukuran sedang lebih mahal ketimbang yang berukuran besar karena masyarakat sekitar lebih menyukai bawang merah berukuran sedang.

Baik John, Charles dan para petani lain menganggap

kehadiran tim Kementan untuk pendampingan selama masa tanam hingga pasca panen betul-betul menyemangati para petani. "Kami di sini betul-betul dikawal teman-teman dari Kementan. Mereka berhari-hari di sini meninggalkan keluarganya untuk memastikan pertanaman di sini. Ini yang sangat menyemangati kami. Adanya Food Estate ini membangun Humbang Hasundutan menjadi daerah yang produktif," pungkas John diamini para petani.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Ir Noverita Sprinse Vinolina MP sangat mengapresiasi upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengubah alang-alang menjadi lahan produktif.

"Saya betul-betul mendukung Program Food Estate yang menjadikan lahan tidur menjadi bernilai income. Ini hanya perlu perawatan terus-menerus, kerja keras yang sungguh-sungguh dan komitmen SDM, terutama dari para petani," kata saat mengunjungi lahan bawang merah, Rabu (17/2/2021).

Guru Besar Fakultas Pertanian ini optimistis Program Food Estate akan berhasil jika didukung oleh pemerintah dan petani. Petani sebagai ujung tombak keberhasilan hanya perlu pendampingan berupa transfer teknologi dan semangat pantang menyerah.

"Saya melihat apa yang ada di lahan Food Estate ini adalah luar biasa. Sekarang ini hanya tinggal memenuhi suplai air pagi dan sore serta mempertahankan unsur hara dan perawatan yang cukup," paparnya

Hadir bersamaan, Guru Besar Tetap USU Prof Dr Ir Abdul Rauf MP menilai bahwa merubah alang-alang menjadi areal pertanian adalah buah keyakinan dan ketelatenan.

"Memang perlu serangkaian perlakuan mulai dari perawatan tanah. Tanah di sini rata-rata bersifat

masam maka perlu dinetralkan dengan dolomit. Tanahnya perlu ditambahkan unsur hara yang sesuai dengan kebutuhan sayuran seperti bawang merah, bawang putih dan kentang," ujarnya.

Profesor Ilmu Tanah ini juga menyebutkan bahwa semak belukar yang terdiri dari tanaman pakis ini juga memiliki sifat dasar membunuh tanaman lain di luar ekosistemnya.

"Pakis ini memiliki zat alelopati yang merupakan senyawa beracun. Sifatnya asam yang dapat membunuh tanaman selain golongannya karena dianggap lawan. Bahkan tanaman alang-alang lainnya, seperti yang kita lihat ini, tumbuhnya merana. Jadi seharusnya yang dapat bertahan hidup hanya tanaman tahunan seperti kopi atau cokelat. Sehingga apabila sayuran dapat tumbuh maka ini hal yang luar biasa. Di sinilah letaknya peran teknologi pertanian," jelasnya.

Melihat kondisi pertanaman yang ada di lahan, kedua Guru Besar ini menyarankan terus dilakukannya perawatan hingga masa panen. Tanaman yang sekarang ini berkembang memang belum semuanya tumbuh optimal, misalnya saja bawang merah. Sekilas ada yang daun bawangnya kecil dan umbinya kecil.

"Tanaman yang terlihat kecil ini bukan gagal tumbuh ya. Wajar karena pertanaman perdana, unsur haranya belum maksimal. Jadi dalam satu kelompok ada yang besar dan ada yang kecil namun lihat ini tetap memiliki umbi. Meski berukuran kecil, umbinya bagus, bisa dipanen dan masyarakat di sini lebih suka bawang berukuran kecil seperti ini. Terus saja melakukan pemupukan dan pengairan yang cukup," lanjut Noverita.

Pada akhir sesi kunjungan, Noverita mengarahkan agar sesuai panen, tanaman diselingi dengan komoditas lain seperti padi baru kemudian kembali ke bawang merah. Dirinya meyakini pada pertanaman berikutnya, hasilnya akan memuaskan. **(tim humas)**



**Food Estate,**

# JALAN KELUAR PENDERITAAN SUMBA TENGAH

**M**ENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (syl) meminta para petani dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengoptimalkan program jangka panjang Food Estate Sumba Tengah, sehingga mampu menopang roda ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumba.

“Saya sangat yakin dengan varietas yang unggul dan sistem pengelolaan yang sudah modern, semua lahan di Food Estate ini (Sumba Tengah, red) bisa mencapai hasil maksimal, bahkan memberi kehidupan yang lebih baik,” ujar Mentan saat meninjau areal Zona 4 Food Estate Desa Makatakeri, Senin, (15/2/2021).

Dia mengatakan, kehadiran Food Estate harusnya mampu disyukuri dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Sumba sebagai jalan keluar dari berbagai penderitaan. Karena itu, para petani dan kelompok taninya harus sama-sama bekerja dan mengelolanya secara baik dan benar. “Makanya hasilnya juga harus maksimal. Paling tidak dua sampai tiga kali lipat lah,” tandasnya.

Mentan menambahkan, ke depan pemerintah akan membangun lebih banyak sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan para petani. Misalnya, dalam

waktu dekat ini akan dibangun sumur bor berikut saluran air untuk pesawahan yang ada di lima zona Food Estate Sumba Tengah.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi berjanji akan segera membuat sarana dan prasarana produksi, berikut semua kelengkapan infrastruktur yang dibutuhkan para petani.

“Semua kebutuhan petani sudah kita siapkan agar mampu mendongkrak peningkatan dan kesejahteraan para petani. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya sudah bisa digunakan,” katanya.

Bupati Sumba Tengah Paulus S. K. Limu menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) terhadap jalanya pembangunan di Kabupaten Sumba Tengah sebagai kabupaten tertinggal yang kini tengah bangkit melalui sektor pertanian.

“Berkat kerja keras Bapak Menteri, kami yakin kabupaten kami tidak akan lagi jadi kabupaten termiskin. Makanya saya bilang, Food Estate ini adalah harga diri. Dengan Food Estate kami akan keluar dari penderitaan. Dan kami sekarang punya falsafah baru, yakni maju, mandiri, dan modern,” katanya

Sementara itu, Welly, perwakilan Kelompok Tani



Makatakeri menyambut baik upaya dan kerja keras pemerintah dalam memperbaiki kehidupan petani Sumba Tengah. Karena itu, ia mengajak seluruh petani agar mengoptimalkan lagi semua lahan yang tersedia.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri (Syahrul Yasin Limpo, red) dan pemerintah daerah (pemda) atas semua bantuan dan kerja keras bapak-bapak dalam memajukan desa kami. Semoga Tuhan memberkati,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Damianus Adar meminta seluruh dosen, para peneliti, dan mahasiswanya turun langsung membantu kegiatan para petani dalam mengembangkan program jangka panjang Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, NTT.

Menurut Damianus, program tersebut perlu mendapat dukungan mengingat Food Estate adalah harapan baru dalam memenuhi pangan berkelanjutan untuk kenutuhan rakyat Indonesia Timur.

“Saya selaku dekan dan atas nama seluruh civitas akademika Fakultas Pertanian Undana menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap pengembangan Food Estate di NTT. Karena itu, saya minta kepada para dosen, peneliti, dan mahasiswa agar dapat berkontribusi di dalam pengembangan program Food Estate,” katanya, Selasa (16/2/2021).

Menurut Damianus, kebijakan pemerintah dalam merancang program food estate dinilai sudah tepat, bahkan bisa menjadi solusi di tengah munculnya ancaman krisis pangan yang melanda dunia akibat Pandemi Covid 19. “Food estate ini adalah program yang bisa memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan pangan bermutu bagi masyarakat di NTT,” ujarnya.

Sebagai informasi, jajaran Kementan terus melakukan

percepatan perkembangan food estate dengan mengalokasikan berbagai bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, benih unggul, alsintan dan juga pembuatan sumur bor solar shell yang terintegrasi dengan infrastruktur lainnya.

Ada 11 Desa yang menjadi titik sentral kegiatan Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah. Ke-11 desa itu di antaranya Desa Wairasa, Umbu Mamijuk, Umbu Pabal Selatan, Umbu Langgang, Anakalang, Wailawa, Tana Modu, Oka Waci dan Makatakeri.

Sedangkan sistem pola tanam yang akan dijalankan pada tahap I adalah pola tanam jagung-padi-jagung, kemudian pola tanam tahap II jagung-padi-jagung dan pola tanam III jagung-padi-jagung serta tambahan polanya ialah sapi-jeruk-kelapa. Adapun dari hasil hitung-hitungan sementara, total luasan tersebut bisa mendulang untung hingga Rp 123 miliar.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri menyampaikan bahwa Program Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ini di antaranya pertumbuhan vegetatif padi yang baik karena dukungan pembinaan teknis, air dari sumur pompa, pupuk dan benih unggul yang telah didistribusikan.

Di samping itu, lanjut Kuntoro, Kementan juga sudah melakukan pengembangan Food Estate di beberapa provinsi seperti Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan NTT. Dua di antaranya, bahkan sudah memasuki masa panen, yakni di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng dan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut.

“Di Pulang Pisau sudah mulai panen dan hasilnya sangat mengembirakan. Kemudian di Kabupaten Humbahas juga sudah mulai panen bawang dengan hasil yang juga tidak mengecewakan,” ujarnya. **(tim humas)**



# STOK PANGAN AMAN DAN TERKENDALI

## Jelang Ramadan-Idul Fitri

**M**ENJELANG Ramadan dan Idul Fitri atau lebaran yang bertepatan pada pertengahan April-Mei 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan 11 bahan pangan pokok aman dan terkendali sampai Mei 2021. "Pangan pokok seperti beras dalam kondisi cukup menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri yang bertepatan pada April-Mei 2021," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi pada Jumat (5/2/2021) di Jakarta.

Menurut dia, pada Maret 2021 sudah mulai panen raya dengan perkiraan produksi beras sekitar 5,7 juta ton. Begitu pula pada April yang bertepatan dengan awal Ramadan. "Meski konsumsi beras akan meningkat pada April-Mei, kita masih surplus sekitar 13 juta ton. Jadi kondisi ini sangat aman," tegas Agung.

Meskipun demikian, terdapat tiga komoditas pangan yang masih dipenuhi dari impor seperti daging sapi, bawang putih, dan gula. Namun hal ini sudah direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan konsumsi sehingga stabilitas pasokan dan harga tetap terjaga.

"Kebutuhan importasi ini telah melalui koordinasi di tingkat Kemenko. Tentu ini harus dikawal importasinya, sehingga volume dan waktu pemasukannya sesuai dengan rencana importasi sehingga kebutuhan jelang Ramadan dan Idul Fitri tetap terjaga," katanya.

Kementan terus berkoordinasi dengan Satgas (Satuan Tugas) Pangan, Kemendag, dan stakeholder terkait untuk mengawal agar stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga. "Saya harap masyarakat tidak khawatir, meskipun biasanya terjadi kenaikan konsumsi di Ramadan dan Idul Fitri. Tapi kita sudahantisipasi dengan pihak terkait untuk ketersediaan dan stabilitas pasokannya," ujar Agung.

"Untuk memastikan stabilitas ketersediaan pangan 11 bahan pokok ini menjadi perhatian penting Mentan Syahrul Yasin Limpo. Bersama Satgas Pangan, kita terus melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah pengamanan stabilitas pasokan pangan," pungkasnya.

Dalam forum Committee on World Food Security (CFS) ke-47 yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (8/2/2021), Agung yang juga ketua Delegasi Republik

Indonesia (Delri) mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Indonesia mengembangkan kerangka hukum yang kondusif untuk hak atas pangan.

"Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas. Kerangka regulasi untuk mendorong hak atas pangan, meliputi UU No 18/2012 tentang Pangan, PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Ketahanan Pangan dan Gizi yang diperbarui setiap lima tahun," ujarnya.

"Kerangka kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program yang fokus pada keberlanjutan rantai pasok pangan dan perlindungan petani dan nelayan," ungkap Agung.

Beberapa program seperti bantuan social (bansos), pemanfaatan pekarangan untuk menghasilkan pola konsumsi pangan lokal yang sehat sebagai bagian dari kontribusi Indonesia pada Dekade PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Selain itu, terdapat pula pertanian keluarga, promosi diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, serta perbaikan sistem logistik pangan nasional.

Berbagai upaya pemerintah tersebut mendukung penurunan prevalensi stunting, wasting, dan overweight dalam tiga tahun terakhir. Selain itu, Indonesia juga mengalami kenaikan ranking menurut Global Food Security Index (GFSI) dari 69 pada 2017 menjadi 62 di 2019. Demikian juga data Food Insecurity Experience Scale (FIES) menunjukkan hasil yang positif di mana skala kerawanan pangan Indonesia menurun dari 8,66 persen menjadi 5,42 persen.

Dalam forum tersebut, Agung juga menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dan siap bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk melalui South-South and Triangular Cooperation, dalam mengatasi dampak krisis Covid-19 yang sedang berlangsung pada sistem pangan.

CFS merupakan forum pertemuan internasional yang membahas kebijakan ketahanan pangan dan gizi secara inklusif melalui perumusan kesepakatan bersama dengan melibatkan beragam pemangku kebijakan dari



seluruh dunia. CFS-47 dilaksanakan secara virtual dan diikuti lebih dari 350 peserta dari 180 negara yang mewakili pemerintah, organisasi internasional, pihak swasta dan LSM.

Di sisi lain, situasi ketahanan pangan nasional mengalami peningkatan dan semakin kuat. Ini setidaknya terlihat dari data yang dikeluarkan Global Hunger Index (GHI) 2020, Indonesia menempati level moderate dengan skor 19,1. Sebelumnya RI masih berada di level serius dengan skor 20,1 pada 2019.

Tren peningkatan juga ditunjukkan dari data Global Food Security Index (GFSI) selama lima tahun terakhir (2015-2019) di mana ranking Indonesia naik 16 poin dari ranking 46 menjadi 62.

Situasi yang sama juga dapat dilihat dari Food Security and Vulnerability Atals (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Berdasarkan data FSVA, jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota rentan rawan pangan pada 2020. Informasi di dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Agung menjelaskan, FSVA ini merupakan acuan dalam upaya mengentaskan wilayah rentan

rawan pangan. "FSVA digunakan oleh lintas sektor dalam upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan yang ditargetkan turun dari 18 persen pada 2019 menjadi 10 persen pada 2024," ujarnya pada Senin (8/2/2021).

Terkait dengan cadangan pangan di daerah, Agung menilai bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak bencana agar lebih cepat disalurkan pada lokasi kejadian bencana.

"Keberadaan CPPD memiliki peranan strategis dalam penyediaan pangan, khususnya di tengah kejadian bencana di beberapa wilayah Indonesia pada awal tahun 2021 ini. Selain itu jika CPPD sudah kuat tentu akan memperkuat cadangan pangan nasional" ungkapnya, Senin (1/2/2021).

"Dengan memiliki CPPD, pada kondisi bencana dan darurat pemerintah daerah (pemda) dapat secara cepat melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terdampak. Langkah ini lebih mudah dibandingkan menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat, karena harus ada penetapan status keadaan darurat atau kerawanan pangan pasca bencana terlebih dahulu" tambahnya.

Dalam kondisi darurat bencana, lanjut Agung, proses penyaluran CPPD lebih ringkas karena bantuan



pangan dapat langsung diberikan kepada masyarakat terdampak melalui instruksi pimpinan daerah. "Untuk itu, saya menghimbau terutama kepada pemda agar mengalokasikan APBD-nya untuk cadangan pangan. Ini akan menjadi pertolongan pertama pada kondisi darurat," ujarnya.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan BKP Risfaheri menjelaskan sepanjang Januari 2021 ini, beras CPPD telah disalurkan oleh dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Jambi untuk masyarakat terdampak bencana banjir.

Selanjutnya, pada wilayah kabupaten, terdapat penyaluran oleh dinas yang menangani urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan, Penajam Paser Utara, Banjar, dan Indramayu untuk korban terdampak banjir, dan pada Sumedang untuk masyarakat terdampak tanah longsor.

Menurut dia, keberadaan CPPD juga dapat dimanfaatkan untuk membantu wilayah lain yang terdampak bencana sebagai wujud kepedulian sosial. Seperti halnya yang

dilakukan oleh Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Jawa Tengah dan Kalimantan Timur (Kaltim), telah menyalurkan beras CPPD yang dimilikinya untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan.

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini akan terus berkomitmen memberikan dan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi daerah lain yang terkena musibah dan bencana dengan memanfaatkan CPPD," kata Gubernur Kaltim Isran Noor saat menyerahkan langsung bantuan beras CPPD Kaltim ke Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat pada Rabu (27/1/2021).

Senada diungkapkan Kadis Ketahanan Pangan Jawa Barat Jafar Ismail menjelaskan, cadangan pangan ini sangat diperlukan untuk masyarakat karena mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar dan juga merupakan daerah rawan bencana.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan CPPD, Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan penguatan melalui advokasi kepada pemda. Hingga saat ini, terdapat 300 pemda yang telah

mengalokasikan CPPD, dengan rincian 31 pemprov dan 269 pemkab/pemkot.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menjelaskan, berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan, tercatat pada 2016 Indonesia masih berada di peringkat 71, dan pada 2019 meningkat di peringkat 62. "Kami memantau secara konsisten index (GFSI) tersebut. Angka ini naik karena dipengaruhi 3 aspek ketahanan pangan sebagai indikatornya," jelasnya.

Menurutnya Nilai Indeks Keseluruhan pada data tersebut ditentukan dari tiga aspek, yaitu Keterjangkauan, Ketersediaan, Kualitas dan Keamanan. Aspek Keterjangkauan dan Ketersediaan untuk Indonesia meningkat cukup drastis sehingga menjadi aspek yang dominan mempengaruhi kenaikan nilai indeks secara keseluruhan.

"Ini tentu tidak terlepas dari upaya-upaya dilakukan pemerintah selama ini, Kementan selama ini terus berupaya membenahi pertanian dari hulu hingga hilir termasuk dalam hal distribusi dan ketersediaan pangan" jelas Kuntoro.

Dari sisi ketersediaan pangan misalnya, Kuntoro mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemerintah salah satunya dengan pembangunan Program Food Estate. Pemerintah membuat Food Estate untuk mempersiapkan pangan rakyat dalam skala ekonomi yang besar.

"Kemandirian pangan terus kita perjuangkan. Ini agar kita mampu berdiri di atas pangan kita sendiri. Apalah artinya index bagus, pangan kita terlihat aman, namun punya ketergantungan pada impor," kata Kuntoro.

Sebagai contoh Singapura menempati index terbaik di dunia, namun hampir seluruh pangannya dipenuhi dari impor, karena negara tersebut tidak memiliki lahan pertanian yang mencukupi. Sementara Indonesia memiliki potensi Sumberdaya Pertanian yang cukup besar.

Selama ini banyak lembaga Internasional yang melahirkan berbagai pengukuran untuk melihat seberapa jauh tingkat perkembangan dari suatu negara terhadap permasalahan tertentu salah satunya permasalahan di bidang pangan. The Economist Intelligence Unit (EIU) bekerjasama dengan Barilla Center for Food & Nutrition juga mengeluarkan indeks keberlanjutan pangan (Food Sustainability Index atau FSI).

"FSI itu memiliki tiga indikator, pertama aspek pertanian berkelanjutan, kedua mengenai kehilangan atau susut pasca panen termasuk limbah, dan ketiga mengenai aspek gizi," terang Kuntoro.

FSI diharapkan mampu meningkatkan awareness

pemerintah, institusi, dan masyarakat terhadap isu food sustainability dan memantau perkembangannya. Selain itu, proyek ini juga dibuat sebagai bentuk dukungan global terhadap target SDG 2030.

Ranking yang dibuat FSI bukan dimaksudkan untuk judgemental, terlebih sebagai tolak ukur kinerja setiap negara dalam menghadapi tantangan sistem pangan global.

Kuntoro menegaskan, selain isu produksi, aspek-aspek penilaian pada data FSI erat kaitannya dengan food loss dan food waste atau pangan yang terbuang dan pangan yang menjadi sampah.

"Salah satu indikator FSI adalah masih tingginya jumlah makanan yg terbuang, akibat perilaku mengambil makanan berlebihan dan terbuang. Kita harus berempati pada negara yang kesulitan mendapatkan sumber makanan," terangnya.

Secara fair malah menurut Kuntoro, Situasi ketahanan pangan nasional yang mengalami peningkatan dan semakin kuat juga dapat terlihat dari data yang dikeluarkan Global Hunger Index (GHI) 2020.

Kuntoro mengungkapkan, Indonesia menempati level moderate dengan skor 19,1, setelah sebelumnya masih berada di level serius dengan skor 20,1 pada tahun 2019. Situasi yang sama juga dapat dilihat dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA).

"Berdasarkan data FSVA, jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada tahun 2019 menjadi 70 Kabupaten/Kota rentan rawan pangan pada 2020," ujarnya.

Sebelumnya, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang terus diupayakan, karena pemenuhan pangan menjadi hak bagi setiap warga negara. Mentan Syahrul Yasin Limpo menegaskan bahwa komitmennya dalam mewujudkan ketahanan pangan karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya tidak bisa ditunda, terlebih lagi di masa pandemi saat ini. "Makan tak bisa ditunda, makan tak bisa menunggu hari. kalau begitu ini menjadi pekerjaan yang tidak pernah putus," tegasnya.

## Gandeng RNI

Mentan Syahrul Yasin Limpo menempatkan upaya stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan strategis sebagai perhatian utama karena menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan menggandeng PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk menyinergikan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan stabilisasi pasokan dan harga

komoditas pangan strategis.

Pada Senin (15/02/2021) Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dan Direktur PT RNI Arif Prasetyo Adi menandatangani perjanjian kerja sama sebagai landasan sinergi stabiisasi pasokan dan harga pangan.

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi yang menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut mengapresiasi korporasi kluster pangan yang akan segera terbentuk untuk lebih cepat mengakselerasi kegiatan-kegiatan ketahanan pangan.

"Adapun permasalahan itu utamanya adalah distribusi dan keberagaman harga, untuk itu kita berharap kestabilan harga segera terbentuk sesuai harapan pemerintah," ungkapnya.

Diapun menyebut pandemi ini menjadi hambatan dalam urusan pangan utamanya terkait persoalan distribusi dan stabilitas harga, karena itu salah satu solusinya dengan menggandeng RNI.

Senada diungkapkan oleh Kepala BKP Agung Hendriadi bahwa kerja sama dengan RNI sebagai BUMN kluster pangan ini dilakukan dalam rangka memperlancar meningkatkan kekuatan dalam distribusi pangan sebagai usaha untuk menstabilkan harga pangan.

"Apa yang kita lakukan hari ini yang pertama adalah untuk stabilisasi pasokan harga termasuk cadangan pangan, stabilisasi harga itu bukan hanya harga di konsumen saja tetapi juga harga di petani," tandasnya.

## Pengendalian WBC

Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Balai Besar Peramalan Organisme Tumbuhan (BBPOPT) Jatisari melakukan pengendalian hama Wereng Batang Coklat

(WBC) di tiga desa, yakni Ciptasari, Cinta Asih dan Mulangsari di Kabupaten Karawang. Pengendalian tersebut melibatkan Dinas pertanian seperti Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Polri (Babinkamtibmas) dan kelompok tani.

"Alhamdulillah pengendalian yang dilakukan lancar, semua berkat laporan dan pengamatan dari petani dan petugas POPT," ujar Surono, petugas POPT BBPOPT.

Dia menambahkan, respon cepat ini bertujuan untuk mencegah meluasnya serangan yang bisa menyebabkan gagal panen (puso). "Selain pengendalian akan diadakan bimbingan teknis (bimtek) di daerah yang masih dianggap rawan serangan seperti desa Pancabaya dan Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru," jelasnya.

Mengantisipasi hal yang sama di daerah lain, BBPOPT membentuk tim pengamanan produksi padi. "Pada 2021 ini, kita membentuk Tim Pengamanan Produksi Padi," tutur Enie Tauruslina Amarullah, kepala Balai Besar POPT.

Tugas utama tim adalah berkoordinasi dengan para pihak (pemda, kelompok tani, Polri/TNI) terkait dan menyelesaikan permasalahan serangan baik hama maupun penyakit yang dapat mengganggu produksi padi.

## Pascapanen

Pengembangan sistem pangan terutama penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian menjadi sangat krusial dalam menjamin dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, terlebih di masa Pandemi Covid-19 saat ini.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, selama Pandemi Covid 19 kinerja positif



pertanian tidak hanya terukir lewat peningkatan nilai dan volume ekspor pertanian, tetapi juga terukir lewat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dia meminta berbagai bentuk kinerja tersebut dapat dimaksimalkan melalui upaya bersama membenahi pertanian dari hulu ke hilir.

"Pertanian itu sangat strategis, permasalahan di dalamnya juga sangat kompleks dan sangat mendalam, permasalahan terjadi tidak hanya sebatas di produksi, tetapi juga terjadi pada tahapan pascapanen, disinilah kami butuh input dari semuanya, dari para ahli," ungkap Syahrul, saat menghadiri pertemuan Perdana Pokja Ahli Ketahanan Pangan di Hotel Atria Serpong, Tangerang.

Syahrul mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini tidak hanya menekankan pada upaya peningkatan produksi pangan, melainkan juga pada upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, hilirisasi, pemasaran dan ekspor produk pertanian yang diharapkan dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) untuk sektor pembangunan lainnya.

"Saya berharap Pokja Ahli Ketahanan Pangan ini dapat menjadi mata, telinga, sekaligus mulut dari upaya-upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan kita. Saya harap upaya ini dapat membantu menyempurnakan pertanian kita dari proses budidaya hingga proses pascapanen, termasuk dalam Program Food Estate," ungkap Syahrul.

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Agung Hendriadi mengatakan, pembentukan Pokja Ahli Ketahanan Pangan ini sekaligus sebagai tindak lanjut arahan Mentan untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian.

"Pokja ini anggotanya terdiri dari kawan-kawan di perguruan tinggi seluruh Indonesia dan sebagian besar dari mereka adalah dekan fakultas pertanian, ada juga peneliti, pengamat dan ahli pertanian yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia," jelas Agung.

Pertemuan Pokja yang perdana ini akan difokuskan pada persoalan pascapanen, pemasaran, distribusi pangan; jaminan keamanan hingga mutu pangan segar. "Optimalisasi penanganan pascapanen dan pemasaran hasil pertanian memiliki potensi untuk dapat mengurangi food loss dan food waste, menekan disparitas harga antar wilayah, membuka kesempatan berusaha serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kami rasa ini sangat penting, karna isu yang akhir ini berkembang adalah terkait food sustainability," ungkap Agung.

Sebagai informasi, Pokja Ahli Ketahanan Pangan diketuai Kepala BKP Kementan, dibantu sekretaris dalam hal Sekretaris BKP. Sementara itu, ada 28 anggota dari latar belakang beragam, mulai dari perguruan tinggi, praktisi, organisasi profesi, pemerintah dan juga unsur organisasi kemasyarakatan. **(tim humas)**

## Pokja Ahli Ketahanan Pangan

**Ketua** : Kepala BKP Kementan

**Sekretaris**: Sekretaris BKP

**Anggota** :

1. Prof Dr Bustanul Arifin (Universitas Lampung)
2. Prof dr H Fasli Jalal SpGK PhD (Universitas Negeri Jakarta)
3. Prof Dr dr Nurpudji A. Taslim MPH SpGK (Universitas Hassanudin)
4. Dr Ir Drajat Martianto MSc (Institut Pertanian Bogor)
5. Dr Jamhari S.P. (Universitas Gadjah Mada)
6. Prof dr Endang Laksminingsm Achadi MPH Dr PH (Universitas Indonesia)
7. Prof Ir Achmad Subagio MAggr PhD (Universitas Negeri Jember)
8. Prof Dr Ir Posman Sibuea MSc (Universitas Katolik SantoThomas)
9. Prof Dr Bernatal Saragih SP MSI (Universitas Mulawarman)
10. Dr Ir Sam Herodian MS (Institut Pertanian Bogor)
11. Dr Ir Damianus Adar MEC (Universitas Nusa Cendana)
12. Dr Endah Sulistyawati BSc PhD (Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung)
13. Dr Eng Muhammad Makky STP MSI (Universitas Andalas)
14. Prof (Riset) Dr Ir Muhammad Noor MS (Balai Pertanian Lahan Rawa, Kementan)
15. Prof Dr Ir Johan Riry MP (Universitas Pattimura)
16. Dr Ir Agus Irianto Sumule (Universitas Papua)
17. Laurentius H. Maturbongs SP MSc (STIPER Santo Thomas Aquino)
18. Ir Adhi Siswaja Lukman (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia)
19. Ir Winarno Tohir (Kontak Tani Nelayan Andalan)-(meninggal dunia)
20. Muhammad Nuruddin (Ketua Komite Nasional Pertanian Keluarga)
21. Ir. Sutarto Alimoeso M.M. (Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Pusat)
22. Ir Entang Sastraatmadja MS (Petani Center)
23. Dr Ir Lukmanul Hakim MSI (Staf Khusus Wakil Presiden)
24. Franciscus Welirang (Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kadin Indonesia)
25. Desianto B. Utomo (Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak)
26. Prof Dr Ir Imam Mujahidin Fahmid MTdev (Staf Khusus Menteri Pertanian)
27. Prof Dr Ir Purwiyatno Hariadi (Vice Chair Person Codex)
28. Dr Ir Riwantoro MM (Analisis Ketahanan Pangan Ahli Utama; BKP)

**Prof Dorodjatun :**

# Kalau Pangan Bermasalah, **MATI KITA**

**S**EMUA elemen bangsa diminta untuk menjaga dan merawat ketersediaan pangan nasional yang sejauh ini masih dalam kondisi baik. Kebutuhan pangan mutlak dipenuhi secara berkelanjutan karena makanan adalah sumber utama dari berbagai kehidupan.

Demikian dikatakan Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Profesor Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam sesi diskusi bertema 'Menakar Kekuatan Sektor Pertanian Sebagai Penopang Ekonomi Nasional' yang diselenggarakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) melalui virtual zoom, Selasa (23/2/2021).

"Beruntung di tengah pandemi seperti saat ini food (pangan, red) tidak jadi soal (bermasalah, red). Kalau jadi soal mati sudah kita," ujarnya.

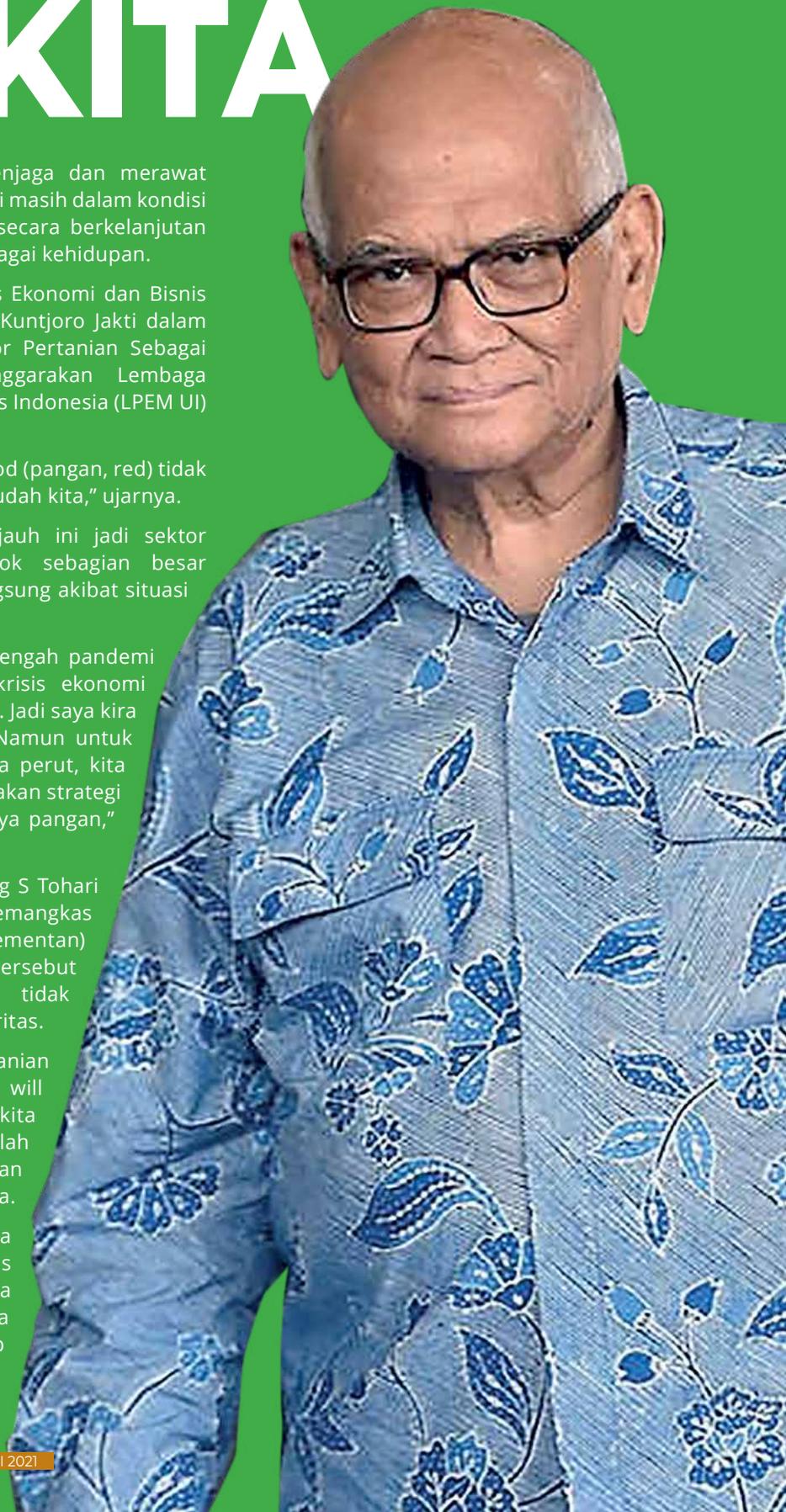
Dorodjatun mengatakan, sektor pertanian sejauh ini jadi sektor alternatif dalam memenuhi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia yang terkena dampak langsung akibat situasi dan kondisi Pandemi Covid 19 berkepanjangan.

"Sangat terlihat jelas bahwa sektor pangan di tengah pandemi jalan terus. di Indonesia saja kalau terjadi krisis ekonomi masyarakat pasti pulang kampung dan bertanam. Jadi saya kira di dunia ini perekonomiannya negatif semua. Namun untuk pertanian masih positif. Sebab kalau kita bicara perut, kita tidak bisa makan janji, makan visi, makan misi, makan strategi dan makan yang lain-lain. Yang kita makan hanya pangan," katanya.

Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI, Endang S Tohari menyangkan kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) hingga mencapai Rp6 triliun. Kebijakan tersebut membuktikan bahwa political will negara tidak menjadikan sektor pertanian sebagai sektor prioritas.

"Ini menunjukkan political will kita terhadap pertanian tidak menjadi prioritas. Ke depan, political will yang berpihak pada sektor pertanian akan kita perjuangkan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat terhadap pangan. Pangan adalah soal mati hidupnya sebuah bangsa," katanya.

Sebelumnya, Peneliti Senior pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Riyanto menemukan adanya kekuatan besar sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai industri manufaktur.



Temuan tersebut, lanjut Riyanto, merujuk pada data, dimana setiap satu persen pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berdampak besar terhadap tumbuh kembangnya 1,36 persen pertumbuhan Industri.

"Ini hasil temuan penelitian kita, dimana setiap satu persen pertumbuhan sektor pertanian, ada 1,36 persen industri yang tumbuh secara masif. Jadi saya kira hubungan antara pertanian dan perekonomian lebih kuat dibanding hubungannya dengan sektor industri," katanya.

Di tempat terpisah, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria membeberkan, indeks ketahanan pangan Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Global Food Security Index, indeks ketahanan pangan di Indonesia kurun waktu 2014-2019 mengalami kenaikan dan terus membaik sehingga lebih tinggi dari Ethiopia, Filipina, Pakistan dan negara berkembang lainnya.

"Pada 2014 mencapai 46,5 indeks, pada 2018 mencapai 54,8 indeks dan 2019 mencapai 62,6 indeks, sehingga Indonesia menduduki peringkat 62 dari 113 negara dunia atau peringkat 12 dari 23 negara Asia Pasifik," ujarnya saat memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu (20/2/2021).

Perlu diketahui, data GFSI 2019 menyebutkan Indonesia menempati peringkat 62 lebih tinggi dibanding Ethiopia dengan peringkat 91 (49,1 indeks), Filipina peringkat ke 64 (61 indeks) dan Pakistan peringkat 78 (56,8 indeks) dan India peringkat 72 (58,9 indeks).

Arif menegaskan, indeks ketahanan pangan berbeda dengan indeks keberlanjutan pangan karena keduanya memiliki indikator yang berbeda. Indeks ketahanan pangan diukur dari 4 kelompok indikator, yakni **keterjangkauan**, ketersediaan, kualitas dan keamanan, serta ketahanan sumberdaya alam.

Sementara itu, Indeks keberlanjutan pangan diukur dengan tiga kelompok indikator yaitu penyusutan dan limbah pangan (food loss and waste), pertanian berkelanjutan, dan beban masalah gizi.

Kedua indeks tersebut diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), dan indeks yang terbaru adalah berasal dari data 2019 dan 2018. Artinya kedua Indeks tersebut menggambarkan situasi pada tahun tersebut.

Senada dengan Razikin Juraid, pengamat kebijakan publik sekaligus penggiat pertanian mengungkapkan, indeks ketahanan pangan Indonesia tahun ke tahun semakin membaik. Ini dibuktikan dengan data Global Food Security Index (GFSI), dimana secara keseluruhan status ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan.

"Dari data ini disebutkan status ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2016 Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 113 negara yang diobservasi dan di tahun 2019 alami peningkatan ke peringkat 62. Ini artinya prestasi bagi sektor pertanian Indonesia. Tak perlu dikhawatirkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Mantan Juru Bicara (Jubir) Milenial Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini menambahkan, sepanjang 2014 sampai 2018 indeks ketahanan pangan secara global berdasarkan data dari GFSI, Indonesia berada pada peringkat ke 65 dunia dan peringkat kelima di Asean. Di kawasan Asean, Indonesia berada di atas Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos.

Sementara itu, skor Food Sustainability Index (FSI) untuk Amerika Serikat sebesar 68,8. Angka ini tidak berbeda jauh dengan Ethiopia sebesar 68,5, sedangkan India 66,4 dan Israel 64,6 di bawah Ethiopia.

"Tidak fair jika dibandingkan dengan negara Eutopia dan Zimbabwe yang notabenehnya negara yang baru bangkit dari kelaparan ke negara yang terpenuhi pangannya," jelasnya.

"Sementara Indonesia bukan negara kelaparan, tapi memang negara yang sudah mandiri menyediakan pangannya dan bertahan untuk tetap mandiri akan pangannya," tandas Razikin.

## Dorong P2L

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Julie Sutrisno meminta pemerintah agar mengutamakan kegiatan yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Dia juga menegaskan, agar penghematan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tidak menasar program-program yang berbasis masyarakat. Dia mencontohkan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan salah satu program untuk mengoptimalkan pekarangan pangan sebagai sumber pangan bagi keluarga,

"P2L memberikan kontribusi signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi, utamanya



mengurangi pengeluaran konsumsi pangan dan memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ujar Julie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Selasa (2/2/2021).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini menambahkan, terlebih di saat pandemi seperti sekarang, masyarakat sangat terbantu dengan adanya P2L, sehingga rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangan dari pekarangan.

Senada diungkapkan Muhtarom, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB. Dia menyebutkan, perlunya

mengoptimalkan P2L sebagai salah satu program yang menyentuh langsung ke masyarakat.

“Dalam situasi pandemi berkepanjangan saat ini, kami harapkan P2L dikembangkan yang merupakan program yang langsung mampu meningkatkan ketahanan perekonomian keluarga dan ketersediaan pangan keluarga,” ujarnya.

Komisi IV DPR RI mendorong penghematan yang minimal terhadap program P2L dalam rangka upaya pemenuhan pangan di masyarakat dan pengentasan kemiskinan. **(tim humas)**

# PANEN RAYA, OPTIMALKAN PERAN KOSTRALING



**U**NTUK mengamankan produksi atau stok beras nasional dan harga pada saat musim panen raya padi pada Maret 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan langkah strategis. Luas panen padi pada Maret 2021 atau puncak panen diperkirakan 2 juta hectare (ha).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan, mengikuti pola musim di Indonesia, bahwa pada saat musim basah produksi padi lebih besar dari musim kering, maka diperlukan pengelolaan ketersediaan yang baik sehingga tidak ada gejala permintaan dan gejala harga di masyarakat.

Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) adalah salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan pangan khususnya beras, maka pengelolaan yang profesional menjadi kunci keberhasilannya.

"Peran Kostraling untuk serap gabah dan menjaga harga di tingkat petani, ibaratnya Bulog-Bulog kecil. Kostraling

menjadi andalan stok beras nasional. Kostraling adalah pioner dari penggilingan-penggilingan padi kecil dan Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) punya peran di dalamnya, kita bersinergi," ujarnya dalam Rapat Kostraling di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

SYL menerangkan, di tengah Pandemi Covid 19 ini, upaya memperkuat ketahanan pangan terus ditingkatkan. Salah satu kuncinya adalah memperkuat sinergitas yang lebih holistik sebagai upaya menghasilkan suatu terobosan dan dapat memotret segala tantangan.

"Saya menyampaikan apresiasi kami kepada petani, kelompok pengelola penggilingan padi serta pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi, yang tidak henti hentinya bekerja keras tidak mengenal lelah untuk mengolah gabah menjadi beras sehingga sampai saat ini masih tersedia," ujarnya.

Lebih lanjut SYL menegaskan, peran Kostraling harus ditingkatkan dengan bersinergi dengan Perpadi. Peran Kostraling disamping mengoptimalkan peran penggilingan-penggilingan padi kecil, namun diharapkan juga dapat menjaga stok beras nasional, harga dan kualitas beras bahkan harus bisa melakukan ekspor.

"Saya minta Perpadi bantu saya, kita pahami apa yang ada. Saya berharap kepala dinas pertanian bersama Perpadi melihat mana yang harus di Kostralingkan. Kita punya peluang besar untuk melakukan akses pasar karena fenomena pandemi ini harga beras dunia naik, ini peluang bagi Indonesia," tegasnya.

Dirjen Tanaman Pangan Suwandi menuturkan, untuk mewujudkan Kostraling yang semakin modern dan Sementara itu, Kementan terus melakukan upaya pemenuhan pangan bagi negeri. Program yang menjadi andalan tahun ini adalah Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi. Adalah program peningkatan produksi padi dengan memanfaatkan lahan baru yang belum pernah ditanami seperti tumpangsari dengan areal perkebunan, kehutanan, lahan rawa, lahan galian eks tambang dan sebagainya.

Program ini sudah dijalankan sejak beberapa tahun lalu dan akan terus menjadi prioritas. Pada 2020 telah dilaksanakan PATB seluas 250.000



ha yang mencakup hampir seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya yang telah berhasil di Indonesia Timur, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah.

Adalah Saryadi, petugas penyuluh lapangan di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah yang mengaku terbantu dengan adanya PATB ini.

"Saya merasa senang sekali beserta Ketua Gapoktan Sido Ngumpul Desa Wai Putih dan poktan berada di hamparan PATB Padi Sawah dalam rangka pelaksanaan panen perdana padi sawah," ucapnya.

Soeparman sebagai ketua Gapoktan Sido Ngumpul merasa bersyukur mendapatkan bantuan PATB sejumlah lima kelompok, yaitu atas nama Poktan Tani Usaha, Purwodadi, Sukamaju, Bina Mukti dan Baru Muncul. "Alhamdulillah semuanya sudah panen dengan hasil baik," ujarnya.

Tak berbeda jauh dengan temannya, Sutimin, ketua Kelompok Tani Usaha mengatakan bahwa bantuan yang diberikan ini bisa mendongkrak produksi padi di wilayahnya. "Kemarin kami dapat benih padi yang berlabel, kemudian dikasih juga pupuk cair, fungisida yang bagus dan herbisida. Semuanya telah kami aplikasikan dan sekarang sudah panen berhasil. Apalagi kami selalu didampingi penyuluh yang monitor terus," ujarnya.

Terpisah, Direktur Serealia Ismail Wahab menyampaikan bahwa program PATB ini bertujuan untuk penambahan areal tanam padi untuk menambah kontribusi produksi padi nasional sehingga meningkatkan ketersediaan stok beras. Sebagai kegiatan padat karya, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat petani di pedesaan yang terdampak Covid-19.

Untuk Maluku Tengah, menurut Ismail tahun 2020 telah dialokasikan PATB seluas 1.000 ha dengan fasilitasi

bantuan saprodi berupa benih, herbisida, pestisida dan pupuk hayati.

Di Jawa Barat (Jabar), upaya peningkatan produksi padi terus digalakkan Kementan untuk menjamin ketersediaan pangan. Keterbatasan lahan sawah disiasati dengan mulai memanfaatkan lahan baru sebagai areal pertanaman padi. Program Perluasan Areal Tanam Padi yang menjadi fokus tahun ini tidak hanya dilakukan di lahan kering tapi juga sudah memanfaatkan potensi di lahan perkebunan maupun kehutanan.

Di Cianjur, salah satunya sudah tertanam padi gogo di areal perkebunan PTPN VIII Agrabinta. Kurang lebih padi gogo ada sekitar 600 ha ditanam yang melibatkan sekitar 2.600 petani penggarap.

"Alhamdulillah sekarang kita bisa panen dan terasakan manfaatnya oleh petani penggarap disini, keuntungan terutama bagi PTPN VIII menjaga kondusifitas areal kita yang memang kita belum garap kembali kita bekerja sama dengan kelompok tani dengan penggarap alhamdulillah program pertama ini berhasil," ujar Endang Saprudin, Manager Perkebunan PTPN VIII Agrabinta.

Dia mengakui dengan adanya Program PATB ini sangat bermanfaat khususnya bagi petani penggarap yang di areal PTPN VIII. "Terima kasih sekali untuk para aparat dari dinas dan kementerian yang telah membantu program ini sehingga program ini sukses," ujarnya

Hal sama disampaikan Rustandi Camat Agrabinta. Bahwa dengan adanya pola tanam tersebut masyarakat dapat tertolong dengan mendapat tambahan penghasilan. "Kami berharap kedepan untuk program ini dapat di kembangkan karena kalau melihat dari persediaan lahan itu cukup luas dengan itu dapat menumbuhkembangkan kembali dunia pertanian di kecamatan agrabinta" sebutnya. **(tim humas)**

# INGIN BENTUK KORPORASI TANAMAN PANGAN? INI CARANYA

**P**EMERINTAH saat ini berupaya melakukan pengembangan kawasan perdesaan dengan berbagai pendekatan guna terwujudnya transformasi ekonomi desa. Salah satunya dengan membangun korporasi pertanian.

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga kini fokus kembangkan Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi (Proktani) dengan membentuk Komando Strategis Penggiling (Kostraling) dan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T).

“Pada 2020, kami menargetkan kawasan korporasi tanaman pangan di 130 kabupaten untuk memperkuat kelembagaan petani melalui model bisnis yang dilakukan secara berkelompok,” ucap Direktur Tanaman (Dirjen) Pangan Kementan Suwandi di Jakarta, Selasa(16/2/21).

Suwandi menguraikan model korporasi tanaman pangan yang dikembangkan ini berasal dari kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang nantinya dapat membentuk badan usaha milik petani maupun perusahaan PT/CV.

“Konsep korporasi dilakukan dengan peningkatan skala usaha hulu hilir dengan teknologi dan kemitraan. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani namun juga meningkatkan komoditas berbasis ekspor,” ujarnya.

Suwandi menekankan, Kementan di bawah arahan Syahrul Yasin Limpo saat ini tengah menerapkan konsep kluster berbasis korporasi petani pada kawasan pembangunan lumbung pangan (Food Estate) yang ada di beberapa provinsi. Ini di antaranya Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Untuk NTT saat ini kita kembangkan utamanya padi pada dua kabupaten, Kabupaten Belu dan Kabupaten Sumba Tengah,” katanya.

Lebih lanjut, Suwandi memaparkan bahwa untuk mendorong pengembangan food estate tersebut, Kementan memberikan bantuan sarana produksi, alat



pra panen dan pasca panen guna meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas, juga mendorong para petani untuk menggunakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Nanti, hasil gabah melalui kostraling akan digiling jadi beras, beras harus keluar sudah dengan packaging dimana packagingnya dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat menembus pasar nasional dan bisa ekspor ke depan,” ujarnya.

Sebagai informasi, Food Estate di Sumba Tengah terbagi menjadi lima zona. Zona 1 ada di Desa Umbu Pabal, Zona 2 di Desa Umbu Pabal Selatan, Zona 3 di Desa Elu, Zona 4 di Desa Makatakeri, dan Zona 5 di Desa Tanamodu, Kecamatan Katikutana Selatan. Pada 2020, lahan Food Estate di Sumba dilakukan pada lahan 5.000 ha terdiri padi 3.000 dan jagung 2.000. Dan rencananya 2021 akan bertambah menjadi 10.000 ha.

Pada 2021, Food Estate juga akan dikembangkan di Kabupaten Belu dengan potensi lahan 380 ha. Rencananya komoditas yang akan dikembangkan pada Musim Tanam I padi seluas 350 ha dan di Musim Tanam II adalah komoditas palawija 200 ha. **(tim humas)**

# SEKTOR PERTANIAN TUMBUH POSITIF

**P**RODUK Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian pada Kuartal IV 2020 menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy). Demikian data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta pada Jumat, (5/2/2021). Nah berdasarkan sektornya, hanya pertanian yang tumbuh positif di tengah melemahnya perekonomian nasional akibat Pandemi Covid 19. "Sektor pertanian merupakan yang tumbuh positif selama Triwulan IV 2020," ujar Kepala BPS Suhariyanto.

Menurut dia, peningkatan sektor pertanian dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya komoditas tanaman pangan yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,47 persen. Ini terjadi lantaran adanya peningkatan luas panen dan produksi padi, jagung, ubi kayu serta cuaca yang mendukung.

"Kemudian komoditas hortikultura juga tumbuh 7,85 persen karena permintaan buah-buahan dan sayuran selama Pandemi Covid-19," tandasnya.

Lebih lanjut, Suhariyanto menyampaikan bahwa komoditas perkebunan juga tumbuh 1,13 persen dengan komoditasnya berupa kelapa sawit. Meski begitu, peningkatan tidak diikuti oleh komoditas peternakan karena menurunnya permintaan industri pemotongan hewan akibat Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan.

"Dari enam besar penyumbang ekonomi terbesar memang hanya sektor pertanian yang masih

mencatat pertumbuhan. Sedangkan sektor industri, perdagangan, konstruksi, transportasi, dan akomodasi makan minum semuanya mengalami pertumbuhan negatif," katanya.

Sementara itu, berdasarkan lapangan usaha 2020 sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen. Bahkan hanya lapangan usaha



pertanian saja yang tumbuh positif dibanding lainnya. "Untuk lapangan usaha pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan dan lainnya semua negatif," ujarnya.

Di tempat terpisah, Direktur Neraca dan Produksi BPS Dody Herlando yang diwakili Koordinator Fungsi Konsolidasi Neraca Produksi Nasional Nur Indah Kristiani mengapresiasi kontribusi sektor pertanian terhadap proses pemulihan ekonomi nasional selama krisis Pandemi Covid 19, yakni sejak 2019 hingga memasuki bulan kedua 2021.

Menurut Indah, data dan statistik sektor pertanian sejauh ini menunjukkan pertumbuhan positif, yakni mencapai 2,59 persen dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertingginya, yaitu 10,47 persen. Angka tersebut didorong karena adanya peningkatan luas panen dan produksi padi, jagung, ubi kayu serta dukungan cuaca yang rekatif bagus.

"Selain itu BPS juga mencatat bahwa sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan 5 sektor lapangan kerja. Kemudian kalau kita lihat dari perdagangan produk pertanian ke luar negeri juga mengalami kenaikan sebesar 14 persen dengan 3 komoditas utamanya, yakni kopi, tanaman obat dan rempah," ujar Indah dalam diskusi Talkshow LPEM UI, Selasa (23/2/2021).

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan Kementan bersyukur sektor pertanian terus mampu menjaga tren positif kontribusinya pada ekonomi nasional. Berita statistik BPS mencatat PDB pertanian pada Kuartal IV 2020 tumbuh sebesar 2,59 persen (yoy), dan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,75 persen (yoy).

"Ini adalah karena petani kita tak henti berkontribusi buat ekonomi nasional. Kami di Kementan membantu mereka menjaga tetap bekerja dengan segala kemampuan yang ada," tegas Kuntoro di Jakarta, Jumat (5/2/2021).

Kuntoro berterima kasih tak terhingga harus diberikan kepada para petani, di tengah lesunya ekonomi dan ancaman pandemi. Pada 2020 dilalui dengan tidak mudah, mulai dengan munculnya beberapa permasalahan dalam produksi hingga pemasaran yang terhambat pembatasan jalur distribusi.

"Petani kita sangat hebat dan tangguh. Kami akan terus jaga momentum ini pada 2021 agar kontribusi sektor pertanian terjaga, bahkan bisa meningkat. Berbagai masalah pada 2020 kita selesaikan agar tidak menghambat produksi," tandasnya.

Politisi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengapresiasi kerja keras jajaran Kementan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan produksi. Kementan dibawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo juga berhasil memacu ekspor dan mengurangi impor, sehingga berkontribusi besar terhadap kesejahteraan petani dan nilai PDB.

"Kinerja baik kementan ini patut kita acungi jempol. Kenapa? sebab di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi, Kementan mampu menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan harga-harga di lapangan," ujarnya, Sabtu (6/2/2021).



Kata Irma, catatan BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor strategis yang perlu mendapat perhatian utama dari semua pihak. "Saya kira sudah saatnya sekarang pemerintah berkonsentrasi pada produksi pangan. Apalagi Kementan mampu menjaga sebelas kebutuhan bahan pokok, sehingga berdampak pada stabilitas harga. Ini yang kemudian menjadi basis perhitungan kenaikan PDB," katanya.

Sementara itu, daya tahan sektor pertanian dan perbaikan sektor pertanian di tengah pandemi merupakan sebuah realitas, bukan fatamorgana. "Di masa Pandemi Covid-19 sektor pertanian secara umum dapat dikatakan kebal terhadap krisis ekonomi nasional. Pertumbuhan positif sektor pertanian memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian nasional,

Pengamat Ekonomi Pertanian Prof Bustanul Arifin memberikan respon positif atas kinerja sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode Kuartal IV 2020. "Rilis BPS tentang pertumbuhan ekonomi semakin menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi bantalan (cushion, red) selama resesi ekonomi karena Pandemi Covid-19," ujarnya.

Terkait kinerja subsektor tanaman pangan dan hortikultura paling tinggi di antara beberapa subsektor dalam pertanian, Bustanul menilai disebabkan karena angka produksi memang meningkat dan harga cukup bersahabat. Ini menyebabkan nilai tambah juga naik signifikan yang menjadi basis perhitungan PDB Pertanian.



"ungkap Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Charles Meikansyah dalam diskusi online yang digelar INDEF dengan bertajuk 'Daya Tahan Sektor Pertanian: Realita atau Fatamorgana', Rabu (17/2/2021).

Dia menyebutkan bahwa sepanjang 2020 di era pandemi yang menghantam perekonomian dunia, termasuk Indonesia membuat PDB Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Namun sektor pertanian mampu membuktikan sebagai salah satu yang tahan terhadap guncangan pandemi, dengan total pertumbuhan sepanjang 2020 sebesar 1,75 persen.

"Tapi perlu jadi catatan bahwa pada kondisi daya beli masyarakat yang turun karena pandemi, persoalan akses pangan dapat menjadi persoalan serius, jika tidak diantisipasi dan ditanggulangi secara baik," ujarnya.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria juga mengapresiasi capaian sektor pertanian Kabinet Indonesia Maju, utamanya di masa Pandemi Covid-19. Ini didasarkan pada fakta dan data bahwa pertanian merupakan sektor yang memberikan andil besar atau penopang perekonomian nasional.

"Sesuai data yang dirilis BPS, sektor pertanian pada Kuartal IV-2020 pun tumbuh sebesar 2,59 persen secara

year on year (yoy), di mana subsektor pendukung utamanya adalah tanaman pangan sebesar 10,47 persen. Semoga kenaikan ini berlanjut hingga tahun 2021. Karena sektor teknis lainnya anjlok maka sektor pertanian menjadi penyelamat perburukan resesi ekonomi Kuartal III," ujarnya saat memberi Kuliah Umum di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Sabtu (20/2/2021).

Di lain pihak, Kemenyan bersama dengan IPB kembali mengevaluasi makro pertanian 2020 yang akan menjadi dasar outlook 2021. Dalam evaluasi tersebut dinyatakan bahwa sektor pertanian Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju terutama di tengah Pandemi Covid-19 ini telah memberikan andil besar dan menopang perekonomian nasional, bahkan di gadang-gadang sektor pertanian diharuskan menjadi lokomotif ekonomi Indonesia.

Menurut Rektor IPB Arif Satria, pertumbuhan sektor pertanian sepanjang era Pandemi 2020 dinilai berhasil menjadi sektor terkemuka. "Saya berharap kondisi seperti ini terus berlanjut pada 2021, dikarenakan sektor teknis lainnya anjlok maka sektor pertanian menjadi penyelamat bagi perburukan resesi ekonomi di Kuartal III," ujarnya usai pertemuan terkait evaluasi makro pertanian 2020 bersama dengan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Senin sore (22/2/2021) di Bogor, Jawa Barat.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Riyanto mengatakan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengarahkan kebijakan ekonomi dan politik negara pada sektor pertanian.

Menurutnya, sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata mengingat kontribusi terhadap ekonomu nasional sudah terbukti dan teruji. "Kepentingan sektor pertanian harus diatas kepentingan yang lain karena ini menyangkut hak hidup orang banyak. Saya kira sektor pertanian tidak boleh dipandang sebelah mata," kata

Riyanto, Minggu (7/2/2021).

Di pihak, LPEM FEB UI juga menemukan adanya kekuatan besar sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai Industri manufaktur.

Menurut Riyanto, setiap satu persen pertumbuhan sektor pertanian secara tidak langsung berdampak besar terhadap tumbuh kembangnya 1,36 persen pertumbuhan Industri.

"Ini hasil temuan penelitian kita, dimana setiap satu persen pertumbuhan sektor pertanian, ada 1,36 persen industri yang tumbuh secara masif. Jadi saya kira hubungan antara pertanian dan perekonomian lebih kuat dibanding hubungannya dengan sektor industri," ujarnya dalam diskusi talkshow berjudul 'Menakar Kekuatan Sektor Pertanian Sebagai Penopang Ekonomi Nasional' yang digelar secara virtual, Selasa (23/2/2021).

Di tempat berbeda, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM) Jamhari menyampaikan pentingnya peranan sektor pertanian terhadap perbaikan dan penguatan ekonomi nasional. "Sektor pertanian itu tidak bisa dipisahkan dari penopang ekonomi nasional. Sebab pertanian adalah sumber utama pendapatan rumah tangga. Bahkan penyumbang PDB, penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa negara," katanya dalam sesi diskusi yang digelar LPEM FEB UI, Selasa (23/2/2021).

Jamhari mengatakan, peranan sektor pertanian juga sangat besar dalam penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri di seluruh dunia. Apalagi, pertanian terbukti mampu berperan terhadap penyediaan bahan pakan dan bahan baku bioenergi.

### Bulog Kecil

Puncak panen raya padi berlangsung pada Maret 2021, diperkirakan seluas 2 juta hectare (ha). Perihal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan



SYL) saat ini tengah menyiapkan upaya nyata untuk mengamankan produksi beras nasional dan harga di tingkat petani yang menguntungkan yakni menjadikan Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling) sebagai Bulog-Bulog kecil.

“Saya minta Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, red) bantu saya. Kita Kostralingkan penggilingan-penggilingan padi skala kecil untuk menyerap gabah, menghasilkan beras berkualitas dan harga jual tingkat petani agar memperoleh keuntungan. Karena itu, saya minta Kostraling menjadi Bulog-Bulog kecil,” ujar SYL pada Rapat Kostraling di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

SYL menjelaskan, Kostraling adalah pioner dari penggilingan-penggilingan padi skala kecil untuk serap gabah dan menjaga harga di tingkat petani. Karena itu, selain sebagai Bulog-Bulog kecil, Kostraling juga harus naik kelas, dari mengamankan stok, harga dan kualitas, juga harus sampai pada tingkat melakukan ekspor sehingga harus bisa menghasilkan beras super premium dengan kemasan yang memenuhi standar pasar internasional.

“Pandemi Covid 19 ini memang membuat perekonomian semua negara ambruk. Tapi dibalik ini, ada manfaat yang bisa kita petik. Misalnya, harga beras dunia naik, sehingga ini yang menjadi peluang kita untuk melakukan ekspor,” bebarnya.

Di tempat terpisah, Mentan Syahrul Yasin Limpo memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) di Aula Kampus utama, Selasa (16/2/2021). Dalam kesempatan itu, Mentan menyampaikan lima poin penting yang dibutuhkan dalam membangun pertanian Indonesia.

“Yang kita butuhkan dalam membangun pertanian adalah konsepsi/program, lahan, orang, teknologi/mekanisasi, dan korporasi/kerjasama, ” ungkap Mentan

Di hadapan para Mahasiswa Polbangtan Gowa, Mentan mengungkapkan bahwa generasi muda bidang pertanian memiliki tugas yang berat untuk membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar karena sektor pertanian merupakan modal utama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara besar.

“Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menyebabkan krisis di berbagai negara, namun Indonesia dapat tetap survive karena sektor pertanian menjadi menyangga utama perekonomian bangsa,” ungkap Mentan

### Solusi Atasi Banjir

Kementerian Pertanian (Kementan) terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, baik di pusat maupun di daerah dalam upaya mitigasi dampak La Nina. Ini di

antaranya dilakukan melalui mapping wilayah rawan banjir, early warning system. Hal itu disampaikan Menteri Syahrul Yasin Limpo dalam arahannya kepada jajaran Kementan.

Selain itu juga, Mentan SYL mengingatkan meningkatkan koordinasi dengan BMKG dan mengaktifkan Brigade La Nina. "Dalam kondisi apapun, antisipasi dan solusi setiap kemungkinan harus dipersiapkan. Intensitas hujan tinggi seperti ini, siapkan benih varietas toleran banjir, pompanisasi in-out, bantuan benih dan AUTP, serta optimalkan dryer dan RMU untuk menjaga mutu produk saat pasca panen," ungkap Mentan SYL.

Hujan yang terus mengguyur kawasan terutama sentra padi, daerah Pantura beberapa waktu yang lalu, menyisakan genangan air dan lahan pertanian terdampak. Beberapa wilayah Pantura di Jawa Barat, seperti Bekasi, Karawang, Subang, Cirebon, dan Indramayu menjadi wilayah dengan dampak banjir terluas. Sambil terus meng-update laporan kejadian banjir pada pertanaman, Kementan melalui Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, juga aktif monitoring langsung ke lapangan untuk mengupayakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan petani.

Saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Subang, Jabar beberapa saat lalu (9/2/2021), Direktur Perlindungan Tanaman Pangan M. Takdir Mulyadi mengatakan, Kementan telah menyiapkan bantuan bagi petani yang terdampak banjir. "Kami akan selalu mengupayakan bantuan bagi petani, yaitu bantuan benih gratis agar petani semangat bertanam kembali serta pendampingan proses klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani peserta asuransi," ungkapnya.

## Dukungan

Di Jabar (Jawa Barat), Ketua Relawan Sekretaris Nasional (Seknas) Jokowi Jabodetabek Monisyah memberikan bantuan benih jagung sebagai upaya mendorong pembangunan pertanian khususnya komoditas jagung di wilayah Kabupaten Bogor.

"Saya berharap bantuan ini dapat memicu semangat petani jagung khususnya di wilayah Bogor, bantuan dari Kementerian Pertanian ini kami harapkan dapat berdampak langsung terhadap pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani" ungkapnya usai melakukan penanaman benih jagung di Desa Situl Ilir, Kampung Babakan Pager Jangkung - Bogor, Minggu (7/2/2021).

Dia mengatakan, bantuan benih jagung sebanyak 40 kg untuk lahan seluas 3 ha di Kabupaten Bogor ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintahan Jokowi terhadap pembangunan pertanian Indonesia khususnya di masa pandemi seperti ini.

"Kami harapkan pertanian dapat tumbuh sebagai salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kami yakin jika pertanian di suatu daerah bisa maju, maka masyarakatnya akan semakin sejahtera" kata Monisyah. **(tim humas)**





# NTP DAN NTUP

## JANUARI 2021

### YANG MENGGEMBIRAKAN

**D**I TENGAH Pandemi Covid-19, kinerja sektor pertanian pada awal 2021 menuai hasil menggembirakan. Ini terlihat capaian peningkatan daya petani dan usaha petani itu sendiri yang mengalami kenaikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Januari 2021 mencapai 103,26 atau naik 0,01 persen jika dibanding NTP pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,45 persen atau lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya sebesar 0,44 persen.

"Indeks yang diterima petani meningkat 0,45 persen sementara yang dibayarkan meningkat 0,44," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam siaran persnya, Senin (1/2/2021).

Sebelumnya, pada Desember 2020 nilai NTP juga naik hingga mencapai 103,25, dengan subsektor tanaman hortikultura sebesar 1,01 persen. Kenaikan terjadi karena indeks yang diterima petani di sektor tersebut mencapai 1,34 persen, sedangkan indeks yang dibayarkan hanya 0,33 persen.

"Adapun komoditas yang mempengaruhi kenaikan indeks yang diterima petani hortikultura sebelumnya adalah cabai rawit, cabai merah, tomat, kol, kubis, wortel, kentang, jeruk dan cabai hijau," katanya.

Sebagai informasi, NTP adalah perbandingan harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian

dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Petani tergolong sejahtera jika NTP di atas 100.

Sementara itu, nilai tukar usaha pertanian (NTUP) yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal pada Januari 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen atau sebesar 104,01 jika dibanding NTUP pada bulan sebelumnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, peningkatan daya beli petani tersebut tentunya sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa fokus program Kementerian Pertanian (Kementan) harus pada perbaikan taraf hidup pada petani. Program kegiatan difokuskan pada peningkatan produksi yang berbasis pertanian maju, mandiri dan modern dan diikuti kualitas pangan berdaya saing ekspor.

"Fungsi Kementan adalah bagian-bagian energi bagi semua pihak untuk menjaga ketahanan pangan nasional dalam kondisi aman dan terkendali, terutama saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Ke depan target kita adalah meningkatkan kesejahteraan petani sebagai agenda yang paling utama," katanya saat diwawancarai, Jakarta (1/2/21).

Tidak hanya itu, Mentan membeberkan program kerja utama Kementan 2021 menyasar pada peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah ekspor yakni dengan meningkatkan produktivitas pertanian dimana daerah yang mengalami defisit akan diberi perhatian yang lebih yang solusif. Langkah ini dinilai dapat memberikan peningkatan pada kesejahteraan petani.

"Tugas kita yang bergerak di sektor pertanian ini tidak kecil. Mau seperti apapun kondisi pandemi saat ini, kita harus terus memastikan kebutuhan pangan 273 jiwa warga Indonesia. Sekarang ini kita harus bisa memaksimalkan potensi produk kita untuk ekspor. Lihat data kabupaten, mana saja yang membutuhkan bantuan. Kita harus bantu fasilitasi," tandasnya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menambahkan, kenaikan NTP dan NTUP merupakan hasil kerja keras para petani di seluruh Indonesia, serta adanya dukungan dari pemerintah daerah dan semua pelaku usaha sektor pertanian. Sinergitas ini tentunya atas dorongan penuh dari Mentan SYL, sebab membangun pertanian adalah tugas negara sehingga harus melibatkan semua elemen.

"Ini adalah capaian yang membanggakan sekaligus modal awal untuk mengawali kinerja sektor pertanian. Capaian ini juga tak lepas dari kerja keras para petani sebagai ujung tombak pertanian Indonesia," katanya.

Hingga saat ini, lanjut Kuntoro, Kementan terus menjalankan berbagai program dan terus mengawal para petani di lapangan. Upaya ini dilakukan dalam mengurangi kesenjangan antara harga di tingkat petani dan konsumen.

"Upaya pemerintah dalam pengendalian harga di tingkat petani maupun tingkat konsumen ini berdampak pada peningkatan daya beli petani. Di satu sisi, petani untung karna produk yang mereka hasilkan dibeli dengan harga tinggi. Di sisi lain, mereka pun bisa membeli kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujar Kuntoro.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus apresiasi kinerja jajaran Kementan atas kenaikan NTP secara nasional pada Januari 2021 menjadi 103,26 atau naik 0,01 persen. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Kementan untuk membahas realokasi anggaran belanja Kementan 2021 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/2/2021).

"Secara garis besar kita juga tentunya mengacu pada hasil dari BPS walaupun hanya naik 0,1 kami memberikan satu kinerja yang baik dan apresiasi kepada Menteri beserta jajarannya atas capaian ini," ujar nya dalam rapat tersebut.

Alien juga kembali menyalurkan pemotongan anggaran di Kementan. Menurutnya, anggaran yang tersedia sesungguhnya untuk kepentingan para petani yang menjadi pelaku utama dalam sector pertanian. Tidak hanya itu, anggaran juga tentunya untuk pemenuhan ketersediaan pangan supaya tercukupi dengan baik khususnya pada kondisi saat ini dimana Pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

"Kita tidak mengetahui sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, maka dari itu Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan atensi yang luar biasa terhadap ketahanan pangan dan juga terhadap para petani kita yang juga yang menopang kehidupan dan kesejahteraan bagi kita semua yang ada di Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR RI Muslim mengatakan bahwa sektor pertanian menjadi sektor yang mampu tumbuh positif di tengah lesu perekonomian namun demikian sektor pertanian selalu mendapatkan beberapa permasalahan dan tantangan di antaranya pemotongan anggaran mengakibatkan Kementan perlu melakukan



refocusing dan realokasi anggaran sehingga rencana kerja mengutamakan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan produksi di tingkat petani. Sekaligus bertujuan memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara umum.

"Kami mendukung agar refocusing dapat menyentuh dan mengangkat pendapatan para petani melalui kegiatan yang bersifat padat karya. Kami juga mendorong agar kegiatan pengolahan hasil pertanian lebih ditingkatkan sehingga dapat memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan pendapatan para petani," tandasnya.

### Upah Buruh Tani Naik

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengungkapkan upah

upah riil buruh bangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor, red) pada Januari 2021 naik 0,10 persen dibanding Desember 2020, yaitu dari Rp90.816,00 menjadi Rp90.907,00 per hari. Sementara upah riil mengalami penurunan sebesar 0,16 persen," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, BPS merilis data kemiskinan yang dikumpulkan pada September 2020. Persentase penduduk miskin sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019.

Tapi Suhariyanto menyebutkan bila membandingkan dengan simulasi tingkat kemiskinan yang dilakukan berbagai lembaga, tingkat kemiskinannya tidak sedalam yang diduga.



buruh tani pada Januari 2021 dibandingkan Desember 2020. Peningkatan terjadi baik untuk upah nominal maupun upah riil.

"Upah nominal mengalami kenaikan 0,46 persen, sedangkan upah riil kenaikannya cenderung flat yaitu 0,01 persen," ungkap Kepala BPS Suhariyanto di Konferensi Pers, Jakarta, Senin (15/2/2021) siang.

Upah nominal buruh tani Januari 2021 senilai Rp 56.276 meningkat dibandingkan Desember 2020 senilai Rp 55.921. Sementara upah riil bulan ini senilai Rp52.331 meningkat dari Rp52.338. Persentase kenaikan upah yang didapatkan oleh buruh tani masih di atas upah buruh bangunan. Suhariyanto bahkan menuturkan

"Bisa dicontohkan, Bank Dunia pernah membuat simulasi jika tidak ada bantuan, maka kemiskinan bisa meningkat 10,7 hingga 11,6 persen. Hasil BPS menunjukkan tingkat kemiskinan memang ada kenaikan. Tapi kenaikan September 2021 sebesar 0,97 persen ini masih di bawah prediksi berbagai pihak," tuturnya.

Lebih lanjut, Suhariyanto menyebutkan peningkatan tingkat perkotaan naik sebesar 1,32 persen dibandingkan September 2019. Sementara peningkatan tingkat kemiskinan di desa lebih rendah, yaitu 0,6 persen. "Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sangat membantu penduduk, terutama lapis bawah," jelasnya. **(tim humas)**

LEGISLATOR DORONG

# PENAMBAHAN ANGGARAN KEMENTAN



**K**ALANGAN legislator mendorong penambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2021. Ini mengingat pertanian merupakan sektor strategis yang sangat dominan dalam memberi kontribusi terhadap peningkatan dan perbaikan ekonomi nasional.

“Pemotongan anggaran Kementan akan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya anggaran Kementan ditambah bukan malah dikurangi. Karena itu kami dukung adanya penambahan,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Passludin, Senin (8/2/2021).

Lebih lanjut, Andi Akmal menyoroti program nilai tambah dan daya saing industri yang merupakan salah satu program kerja Kementan pada 2021. Program tersebut harus mendapat perhatian khusus karena mampu meningkatkan ekspor pertanian Indonesia.

“Berbicara hal ini pasti terbesit peningkatan ekspor. Pada 2020 nilai ekspor pertanian naik 15,79 persen dan ini perlu terus kita dorong dengan anggaran yang layak,” katanya.

Senada juga disampaikan Anggota komisi IV lainnya, Abdullah Tuasikal. Menurut dia, sektor pertanian patut mendapat perhatian serius karena terbukti mampu berkontribusi positif terhadap perbaikan ekonomi nasional dalam masa Pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, hal tersebut ditujukan dengan kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja serta kenaikan nilai ekspor pertanian. Selain itu, peningkatan tolak ukur kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus mengalami perbaikan.

“Kami menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementan karena untuk mengoptimalkan program-program agar mencapai target dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup. Karena itu kami mendukung penambahan anggaran,” katanya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian dan sejumlah pejabat Kementan di Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin (8/02/2021).

Ke depan, lanjut Abdullah, Kementan bisa mengutamakan kegiatan yang memberikan dampak positif pada pemilihan ekonomi nasional dan mengharapkan agar memberikan prioritas dalam program padat karya dan kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Anggota Komisi IV DPR RI Charles Meikyansyah berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran Kementan melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Perubahan (APBN-P). Sebelumnya, anggaran Kementan dipangkas hingga Rp6,33 triliun.

“Kalau APBN-P dilaksanakan saya akan perjuangkan agar ada penambahan. Atau paling tidak dikembalikan pada angka semula,” ujar Charles dalam diskusi INDEF berjudul ‘Daya Tahan Sektor Pertanian : Realita atau Fatamorgan’, Rabu (17/2/2021).

Charles mengaku kecewa, sekaligus menyayangkan pemangkasan anggaran yang dilakukan. Apalagi, sektor pertanian merupakan sektor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi sebagai realita dan kenyataan saat ini.

“Kalau kita lihat judul diskusi hari ini. Saya pikir sektor pertanian sebagai penyelamat ekonomi adalah realita, bukan fatamorgana. Karena itu sekali lagi saya menyesalkan pemotongan anggaran yang dilakukan,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (POPMASEPI) Isya Anshori mengatakan, upaya Kementan dalam menjaga kestabilan pangan nasional, dinilai perlu dukungan yang kuat. Ini agar kedaulatan pangan nasional dapat diwujudkan.

Di tengah tekanan Pandemi Covid-19, dan tuntutan pemenuhan kecukupan pangan nasional, menurut Isya, alokasi anggaran sektor pertanian kurang memadai.

“Pada 2021, saya baca pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.032 triliun untuk belanja kementerian, sayangnya anggaran Kementan hanya sebesar Rp21,83 triliun, lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran kementerian lainnya,” tegasnya di Jakarta, Minggu (31/1/2021).

Pada awal 2021 ini pun sudah banyak masalah yang berkaitan dengan sektor pertanian yang terjadi. Mulai dari kelangkaan pupuk, hingga kelangkaan kedelai. Ini tentunya dinilai Isya perlu disikapi bersama, karena jangan sampai berimbas pada kestabilan pangan nasional. Berbicara upaya untuk menegakkan kedaulatan pangan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, dimulai dari sarana produksi seperti benih dan pupuk, alsintan, hingga sumberdaya manusia dalam hal ini petani. **(tim humas)**

# PERMINTAAN MELONJAK, HORTIKULTURA MEROKET



**D**I TENGAH melemahnya perekonomian nasional akibat Pandemi Covid-19, sektor pertanian kembali menunjukkan keperkasaannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian tumbuh sebesar 2,59 persen secara year on year (yoy) pada Kuartal IV 2020. "Sektor pertanian merupakan yang tumbuh positif selama Triwulan IV 2020," ujar Kepala BPS Suhariyanto.

Pertumbuhan positif sektor pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya komoditas hortikultura yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,85 persen. Ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan buah dan sayur selama Pandemi Covid-19.

"Komoditas hortikultura juga tumbuh 7,85 persen karena permintaan buah-buahan dan sayuran selama pandemi Covid-19," ujar Suhariyanto.

Peningkatan produksi hortikultura yang cukup tinggi terjadi pada komoditas pisang sebesar 8,38 persen, mangga sebesar 2,86 persen dan cabai rawit sebesar 12,33 persen.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

"Kerja keras Kementan selama satu tahun memperlihatkan hasil positif. Ini terlihat dari indikator capaian makro pada 2020 bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sekalipun di tengah Pandemi Covid-19," paparnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI pada akhir Januari 2021.

Sementara pada 2021, Kementan akan terus meningkatkan produk hasil hortikultura, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Demi mencapai tujuan tersebut, Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto dalam paparannya mengungkapkan ada tiga strategi utama pengembangan hortikultura 2021-2024 antara lain Pengembangan Kampung Hortikultura, Penumbuhan UMKM Hortikultura, dan Digitalisasi pertanian melalui pengembangan sistem informasi.

Dalam mengembangkan Kampung dan UMKM Hortikultura, Prihasto menjelaskan perlu adanya integrasi yang baik dari hulu ke hilir. "Di mulai dari sisi hulu, Ditjen Hortikultura akan berfokus pada peningkatan kualitas perbenihan dan tata kelola produksi ramah lingkungan. Sementara dari sisi hilir,

fokus diutamakan pada fasilitasi bahan baku industri, mendukung ketahanan pangan dan mendukung ekspor. Kedua sisi ini akan saling terintegrasi untuk mewujudkan pengembangan kawasan komoditas hortikultura yang optimal,” ujar Anton, sapaan akrabnya.

Sementara itu, terkait digitalisasi pertanian, Anton memaparkan sejumlah sistem informasi dan platform yang diinisiasi oleh Ditjen Hortikultura. “Mendukung era 4.0, Ditjen Hortikultura merancang sistem informasi dan platform hortikultura digital yang dapat digunakan baik petani, pengusaha maupun masyarakat umum. Ini di antaranya Early Warning System, Registrasi Kampung Hortikultura, SIG OPT Hortikultura, Horti Trade Room serta IMOFC,” pungkasnya.

Di lain pihak, Program Gerakan Mendorong Produksi Hortikultura Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan (GEDOR HORTI) terus digaungkan. Ini di antaranya diwujudkan melalui pengembangan Food Estate dan 1.000 Kampung Hortikultura.

Pasca keputusan pengurangan pagu anggaran 2021, Direktorat Jenderal (Ditjen) Hortikultura harus melakukan refokusing dan mengubah alokasi anggarannya. Namun, tidak menyurutkan semangat untuk berkonsentrasi pada pengembangan hortikultura berskala luas.

### **Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah 1.000 Kampung Hortikultura.**

Kampung-kampung Hortikultura akan dibangun dalam satu wilayah administratif desa dengan luasan 5-10 ha bergantung pada komoditas yang dikembangkan

pada kampung tersebut. Untuk satu kampung buah dan sayur, luasan lahan yang diperlukan minimal adalah 10 ha. Sementara itu, untuk satu kampung tanaman obat diperlukan lahan minimal seluas 5 ha.

Kampung Hortikultura mengusung konsep One Village One Variety (OVOV). Komoditas unggulan yang akan dikembangkan, dipilih berdasarkan kesesuaian agroekosistemnya dan permintaan pasar untuk menjamin pemasaran hasilnya. Pengembangan 1.000 Kampung Hortikultura direncanakan terdiri dari 56 kampung pisang, 47 kampung mangga, 61 kampung manggis, 167 kampung durian, 75 kampung kelengkeng, 72 kampung alpukat, 45 kampung jeruk, 2 kampung buah naga, 200 kampung bawang merah, 200 kampung cabai besar, 15 kampung sayuran daun, 50 kampung tanaman obat, 68 kampung bawang putih, 30 kampung cabai rawit, 25 kampung kentang, dan 4 kampung bawang bombay.

“Pengembangan kampung hortikultura ini akan kita sosialisasikan di Kostratani dan ditampilkan di Agriculture War Room (AWR) Kementan. Kita umumkan bahwa di desa ini terdapat kampung buah atau sayuran tertentu. Kalau kita mau memajukan hortikultura, maka kita harus mulai menggunakan konsep ini,” ujar Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Hortikultura 2021 Pasca Refokusing di Bogor, Kamis (28/1/2021).

Di sisi lain, Kementan terus berupaya dan siap berkolaborasi dengan semua pihak yang memiliki visi dan misi sejalan untuk menghadirkan model kemitraan agribisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang dapat meningkatkan skala ekonomi, pendapatan petani, dan meningkatkan produktivitas.



Salah satu bentuk kolaborasi dan dukungan itu diberikan Kementan kepada Pilot project closed-loop yang diinisiasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Kini, project tersebut bergerak di bagian hilir.

Pilot Project Closed-loop merupakan suatu pendekatan untuk mendorong perkembangan agribisnis berkelanjutan melalui ekosistem digital. Closed-loop membentuk suatu rantai pasok dan rantai nilai produk hortikultura sehingga hasil pertanian petani akan memiliki pasarnya tersendiri. Ke depannya, petani tidak lagi mencari pasar dari produk yang dihasilkannya melainkan petani didorong untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan pasar.

Petani milenial dari Garut yang tergabung dalam project ini mengirimkan hasil produksi perdananya ke Paskomnas Tangerang, Minggu (31/1/2021). Kementan sangat mendukung penuh pilot project ini, terlebih

Pesantren Al-Ghazali Bogor, Minggu (21/2/2021). Mentan bersama Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kota Bogor Ecky Awal Mucharam, dan Pimpinan Ponpes Al Ghazaly KH Mustofa Abdullah, melakukan panen Bayam yang dikembangkan dengan sistem hidroponik.

Mentan SYL menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Ponpes Al Ghazaly dalam memanfaatkan setiap jengkal lahan untuk dioptimalkan sebagai penghasil sumber pangan. "Kerja-kerja pertanian itu adalah perintah Nabi dan Tuhan. Ia menembus langit, dan lintas transedenai. Menyediakan pangan sebagai sumber kehidupan adalah sesuatu yang mulia," kata pria yang akrab dipanggil Komandan.

Oleh karena itu, mengelola pertanian menurutnya tidak bisa dilakukan sendiri. Harus melibatkan tangan-tangan lain. "Saya bahagaia sekali. Hari ini ditunjukkan



project ini menasar produk hortikultura yang sedang dikembangkan Kementan untuk skala luas.

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura Kementan Bambang Sugiharto mengatakan, Ditjen Hortikultura akan turut membantu petani untuk dapat menghasilkan produk hortikultura yang berkualitas. "Tahun ini tema kita adalah produk berkualitas. Hasil produk dari petani sudah harus dilakukan seleksi, trimming, grading dan cleaning. Untuk sementara kami akan memfasilitasi 90 kelompok tani dengan peralatan tersebut," ujarnya.

Sementara di Jawa Barat (Jabar), Mentan Syahrul Yasin Limpo mengunjungi Green House yang dikelola Pondok

bagaimana kerja-kerja kolaboratif itu memang bisa dilakukan dan dampaknya nyata. Pondok Pesantren, legislatif, pemda dan BI bisa sinergi. Kementan siap support Pak Wali," tandasnya.

### **Antisipasi Gejolak Cabai**

Dalam kondisi puncak musim hujan dan iklim basah tahun ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) memberikan arahan kepada Ditjen Hortikultura untuk mengendalikan gejolak pasokan dan harga cabai yang terjadi pada beberapa hari terakhir, khususnya cabai rawit.



Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto membenarkan hal tersebut. Saat dihubungi via telepon pada Kamis (18/2/2021), Anton, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa berbagai program dan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga telah dilakukan oleh Ditjen Hortikultura.

"Kami sampaikan bahwa berbasis Early Warning System (EWS) aneka cabai yang kita susun hingga lima bulan ke depan memang menunjukkan terjadinya penurunan surplus pada Februari, namun akan kembali meningkat surplusnya di akhir Maret. Selanjutnya, diprediksi akan terjadi panen raya pada April sampai Juli," papar Anton.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Anton, terkait penjaagaan ketersediaan, Kementan telah memiliki sistem EWS yang dapat memberikan acuan untuk pola tanam. Data EWS tersinkronisasi ke seluruh provinsi di Indonesia yang datanya langsung dari tingkat kecamatan.

Saat ini memang terdapat kondisi yang tidak mampu dikendalikan, yakni faktor alam dan tingginya curah hujan yang terjadi sejak Desember atau fenomena La Nina. Tingginya curah hujan tidak dapat dipungkiri berpengaruh pada proses produksi cabai maupun distribusinya dari wilayah produsen ke wilayah konsumen.

Untuk mengatasi gejala harga cabai, termasuk cabai rawit, Kementan melalui Ditjen Hortikultura telah melakukan usaha pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan). Selain itu, disediakan juga bantuan biaya untuk mendistribusikan produk dari daerah yang sedang panen ke titik-titik pasar yang membutuhkan.

Di tempat terpisah, Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam 10 besar penyumbang produksi cabai tertinggi untuk Jawa Tengah (Jateng). Selain potensi lahan yang subur dan cocok untuk pengembangan cabai, semangat petani-petani muda yang tergabung dalam kelompok milenial juga menjadi salah satu faktor keberhasilan. Mereka mampu menciptakan gebrakan baru dalam pemasaran

cabai di Cilacap.

Selama ini, sebagian besar petani cabai di Kabupaten Cilacap bergantung pada tengkulak. Tengkulak memberikan modal usaha bagi petani cabai dan petani harus menjual hasil panennya kepada tengkulak tersebut. Penjualan melalui tengkulak dirasa tidak transparan dari sisi harga. Selisih harga yang diterima petani dengan harga di pasar mencapai Rp15.000 per kg.

Rantai tata niaganya pun panjang. Dari petani ke tengkulak, kemudian ke pedagang-pedagang besar, dilanjutkan ke bandar dan baru ke pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, Kelompok Tani Milenial 'Karya Muda' yang merupakan bentukan dan binaan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap bersama-sama dengan PPL menginisiasi untuk memotong rantai tata niaga cabai dari petani hingga pasar. Mereka melakukan jual-beli cabai secara transparan dan bisa menekan margin harga.

Dengan adanya pola pemasaran dari Kelompok Tani Milenial 'Karya Muda', petani mulai banyak yang mengusahakan cabainya dengan modal sendiri dan mengurangi pinjaman modal dari tengkulak. Saat ini sudah 10 persen dari 70 petani cabai di Desa Palugon, Kec. Wanareja yang menanam cabai dengan modal sendiri dan menjual hasil panennya melalui Nasihin, ketua Kelompok Tani Milenial.

Rasam, salah satu petani cabai asal Desa Palugon, Kec. Wanareja, Cilacap saat ditemui di lahannya menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang dengan adanya Kelompok Tani Milenial.

"Saya sangat senang dengan adanya Pak Nasihin itu. Kalau dulu kami menjual cabai lewat tengkulak perbedaan harganya yang kami terima dan harga di pasar sampai Rp15.000 per kg. Setelah lewat Pak Nasihin, sebelum cabainya diangkut saja kami sudah dikasih tahu harganya. Perbedaan harganya juga hanya Rp5.000 per kg. Terkadang pembayarannya juga langsung kita terima pada waktu cabainya diambil. Kami jadi semangat tanam dengan modal sendiri," jelasnya. **(tim humas)**

# KISAH MENTERI BUMN & TANAMAN HIAS



**M**ENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tampaknya sedang menggemari aneka ragam tanaman hias. Ini terlihat dari postingan Instagram Erick yang di post pada Sabtu (6/2/2021).

Bagi Erick, tanaman hias adalah penyegar mata, juga pikiran disela padatnya jadwal pekerjaan. "Buat saya tanaman bukan hanya hiasan, tapi penyegar mata, pikiran di sela kesibukan," tandasnya.

Erick mengaku baru menyadari adanya kegemaran baru yang dilakukan masyarakat selama Pandemi Covid-19. Kegemaran teraebut tak lain adalah merawat dan mempercantik ruangan dengan ragam tanaman hias.

"Ternyata belakangan ini, merawat dan mempercantik rumah dengan tanaman hias jadi salah satu kegiatan yang sedang populer ya. Makin banyak penggemarnya, termasuk tim saya," katanya.

Menurut Erick, hobi baru ini sebenarnya bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membuka peluang bisnis ekonomi kreatif. Apalagi tanaman hias memiliki

prospek dan pasar yang luas nan menjanjikan.

"Hobi baru ini membuka peluang bisnis baru dan saya melihat banyak yang sukses. Berawal dari hobi, berujung jadi bisnis yang menjanjikan," ujarnya.

Terkait hal ini, Erick memberi saran dalam memulai bisnis. Yang pasti, lanjut Erick, pebisnis pemula harus mampu beradaptasi dengan situasi yang ada. Termasuk berpikir kreatif, inovatif dan adaptif. "Dan yang paling penting adalah kejujuran. Saya yakin bisnis ini akan berkembang," ujarnya.

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan bahwa tanaman hias merupakan salah satu bidang pertanian yang memiliki pasar tetap untuk negara Asia, Eropa bahkan Amerika. Apalagi, Indonesia memiliki keunggulan khusus karena letak poisisinya yang berada di area tropis.

"Kita akan mendorong anak-anak milenial untuk mengembangkan tanaman hias dengan menghadirkan tanaman bergaya tropis untuk di ekspor keluar negeri," tutupnya. **(tim humas)**



# Selamat Jalan TOKOH PERTANIAN INDONESIA!

**D**UNIA pertanian berduka. Salah seorang tokoh pertanian Indonesia, Winarno Tohir menghembuskan napas terakhir. Ketua Kontak Tani Nelayan Indonesia (KTNA) itu sebelumnya sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit (RS) Pertamina Cirebon.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KTNA Sofyan mengabarkan, Winarno Tohir meninggal dunia pada Sabtu subuh (6/2/2021) sekitar pukul empat pagi.

Winarno Tohir meninggalkan istri dan tiga anak. Almarhum yang juga pernah menjadi Ketua Kelompok Tani Sriunggul di Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu pada 1982 dimakamkan di kampung halamannya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan rasa duka yang mendalam atas kepergian tokoh petani Indonesia ini. "Almarhum sangat memahami persoalan. Berdiskusi dengannya selalu memberikan perspektif baru dalam mengelola pertanian. Beliau sangat concern terhadap kualitas dan regenerasi sumber daya manusia pertanian," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).

Menurut Mentan SYL, Winarno Tohir telah meninggalkan jejak pengabdian yang sangat berharga bagi pertanian Indonesia.

"Kementan bersama KTNA yang dipimpinnya memiliki cita-cita yang sama, bagaimana memperkuat pertanian sebagai tulang punggung bangsa yang dimulai dari

desa-desa. Karena itu, atas nama keluarga besar Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi atas apa yang sudah almarhum lakukan," kata SYL.

Sebelum menjabat sebagai Ketua KTNA Winarno Tohir sebelumnya menduduki Sekretaris KTNA pada 1999. Dedikasi dan kepeduliannya dalam pertanian yang kemudian menghantarkan ia menggantikan Haji Oyon Tahyan pada 2000 sebagai Ketua KTNA.

Winarno Tohir, menurut Mentan SYL adalah sosok yang mampu menjembatani aspirasi petani dan kepentingan pemerintah.

"Pemikiran dan konsepsi kami (Kementan, red) ada irisan dengan gagasan yang ia tawarkan. Ia juga tak sungkan menyampaikan kendala-kendala lapangan yang dialami petani. Soal bagaimana menerapkan mekanisasi untuk mereduksi losses panen dan peran penyuluh sebagai ujung tombak di lapangan, ia juga utarakan. Dan itu bukan sekadar wacana, tapi ia lakukan dengan menerjunkan penyuluh-penyuluh swadaya," ungkapnya

Mentan SYL medoakan semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikanketabahan dan kesabaran. "Kami atas nama keluarga besar Kementan mendoakan semoga apa yang telah almarhum perbuat, dicatat sebagai amal sholeh dan menjadi teladan bagi kita semua," pungkasnya. **(tim humas)**



## EKSPOR PERTANIAN

# JUGA SEMAKIN MENANJAK

**S**EIRING membaiknya sektor pertanian di tengah Pandemi Covid-19, ekspor dalam negeri juga semakin meningkat. Berdasarkan data perkembangan ekspor-impor yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pada Januari 2021 mencapai USD15,30 miliar atau naik 12,24 persen dibanding Januari 2020 (yoy).

Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menuturkan, peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena adanya peningkatan ekspor migas sebesar 8,30 persen dan nonmigas naik lebih tinggi, yaitu 12,49 persen. Berdasarkan sektor, kenaikan ini karena ekspor semua mengalami kenaikan, yakni pertambangan dan lainnya sebesar 16,92 persen, pertanian 13,91 persen, industri pengolahan 11,72 persen dan ekspor miga naik 8,3 persen.

"Jadi secara year on year nilai ekspor Januari pada 2021 ini mengalami peningkatan 12,24

persen. Menurut sektor, mengalami kenaikan yang menggembirakan, bahkan sampai dengan dua digit," terangnya di Jakarta, Senin (15/2/2021).

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri menjelaskan, peningkatan secara spartan ekspor sektor pertanian dan berkontribusi besar terhadap perekonomian makro merupakan capaian yang diraih dari hasil kerja dan program yang bagus. Tidak hanya fokus pada produksi, Kementan di bawah komando Syahrul Yasin Limpo (SYL) memacu hingga aspek hilir agar terjadi kenaikan ekspor pertanian.

"Kementan memiliki program jangka panjang Gerakan Tiga Kali Ekspor (Geratieks), sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini untuk mengakomodir semua kepentingan para pelaku pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir. Program ini dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi nasional, mulai dari sisi produksi sampai proses pengolahan," ucapnya.

Selain itu, Kementan pun memiliki program yang tujuannya utamanya menggairahkan komoditas ekspor dan peningkatan kesejahteraan petani yakni mensinergikan hulu dengan hilir salah satunya melalui pengembangan korporasi berbasis komoditi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas strategis



ekspor lainnya. Di sisi lain, peningkatan ekspor pun terpacu dengan tersedianya kemudahan pelayanan.

"Pencapaian peningkatan ekspor tentunya dari banyaknya perubahan dan adanya program terobosan yang implementatif dan inovatif sehingga membangun sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern. Artinya penggunaan teknologi modern menjadi kunci dan adanya kemudahan serta sinergitas pemerintah dengan pelaku usaha, petani dan pemerintah terbangun dengan baik," jelas Kuntoro.

Di tempat terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) melepas ekspor perdana produk olahan unggas dari PT Charoen Pokphand Indonesia ke Qatar. Acara pelepasan ini dilakukan secara virtual melalui media daring, mengingat wilayah DKI Jakarta masih menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala Mikro.

Acara pelepasan produk ekspor perdana ke Qatar ini dihadiri secara virtual oleh Duta Besar RI untuk Qatar, Deputi Bidang Koordinasi Pangan & Agribisnis, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kepala BPOM, Ketua Satgas Pangan, Ketua Komisi KPPU, serta jajaran Eselon I lingkup Kementan.

"Saya bahagia dan berbangga hati bahwa kita akan melepas ekspor perdana produk olahan unggas Indonesia pertama yang berhasil menembus negara Qatar dari PT Charoen Pokphand Indonesia," ujar SYL saat melepas ekspor tersebut, Rabu (24/2/2021).

la menjelaskan, ekspor perdana ke Qatar ini dilakukan sebanyak 3,29 ton dengan nilai Rp220 juta dari total kontrak 21,6 ton untuk 2021 yang telah disepakati antara PT Charoen Pokphand Indonesia dan pihak buyer di Qatar. "Ini bukan soal uangnya yang banyak, yang penting terobos pasarnya dahulu, kita siap backup bantuan yang dibutuhkan, kita siap!" tegasnya.

SYL berharap ekspor perdana ke Qatar ini bisa menjadi pintu masuk produk-produk olahan unggas asal Indonesia ke kawasan Timur Tengah. Selain Qatar, adapun ekspor lanjutan ke Jepang. Pengiriman produk olahan unggas ke Jepang ini sebanyak 6 ton dengan nilai Rp250 juta. Ini merupakan repeat order kesekian kalinya sejak 2018 ke PT. Charoen Pokphand.

Selain produk olahan unggas dilakukan juga ekspor lanjutan 6 kontainer pakan unggas ke RDTL, sekitar 120.000 kg dengan nilai Rp740 juta. "Repeat order ini menunjukkan bahwa produk Indonesia semakin digemari di Jepang. Saya juga ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada PT Charoen Pokphand Indonesia atas realisasi ekspor unggas dan produknya pada 2020 sebesar USD 2 juta ke negara Jepang, Papua Nugini dan Timor Leste," paparnya.

Di sisi lain, tren ekspor komoditas Sarang Burung Walet (SBW) terus menunjukkan peningkatannya selama kurun waktu lima tahun terakhir, menjadikan komoditas asal sub sektor peternakan ini sebagai icon baru ekspor asal pertanian.





“Diperlukan kesungguhan dan kepatutan yang tinggi untuk dapat memenuhi standarnya, karena selain kandungan nitrit diperlukan juga hygiene sanitasi sesuai standar keamanan pangan Internasional,” katanya.

### PORANG JADI PRIMADONA

Tanaman porang strategis untuk dikembangkan selain kaya manfaat, tanaman ini juga punya peluang yang cukup besar untuk diekspor. Sejak 2019, porang yang tadinya tanaman liar mulai sukses jadi primadona petani.

Dari data yang dirilis BPS, tercatat ekspor pertanian pada Januari 2021 tumbuh 13,91 persen (YoY) dan kinerja ekspor komoditas SBW bersama dengan komoditas aromatik, rempah dan hasil hutan menjadi penyumbang terbesarnya.

“Sebagai pengekspor SBW terbesar di dunia, para pelaku usaha RI banyak menasar pasar Cina karena harga jual yang lebih tinggi dibandingkan negara tujuan lain,” kata Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil melalui keterangan tertulisnya, Minggu (21/2/2021).

Menurut Jamil, tahun lalu dari 1,1 ribu ton ekspor SBW, 23 persen atau 262 ton berhasil masuk Tiongkok, sisanya 77 persen ke 22 negara lain seperti Australia, Hongkong hingga Amerika Serikat.

Pada kesempatan lain, Boedi Mranata, ketua Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) juga menyebutkan bahwa proses menembus pasar Tiongkok membutuhkan waktu yang lama dan panjang.

“Porang sudah jadi primadona dan Insyallah akan terus jadi primadona mengingat bahwa itu adalah kebutuhan pokok dan kebutuhan industri,” ujar Ketua Umum Petani Penggiat Porang Nusantara (P3N) Ngakib Al-Ghozali, Sabtu (27/2/21).

Ngakib menambahkan, di Jepang, porang digunakan untuk memberi makan ratusan ribu pasukan yang sedang berperang di hampir seluruh daratan Asia seperti Korea, Cina, dan sebagainya.

Pada 1943, Jepang datang menjajah negeri ini bukan untuk mencari rempah rempah seperti orang Eropa melainkan untuk mencari makanan utama mereka, yakni konjak atau porang bukan beras atau gandum.

“Porang adalah fenomena zaman. Beratus ratus

tahun Porang ada di bumi pertiwi ini, di pinggir jurang, di bawah rumpun bambu, di bawah pohon duku dan pepohonan yang rindang, di semak belukar, di hutan lebat, tanpa ada orang kita sudi menengok atau bisa memanfaatkannya," tambahnya.

Sementara itu, Dirjen Tanaman Pangan Suwandi mengatakan, Kementan di bawah komando Menteri Syahrul Yasin Limpo saat ini memang menggenjot pengembangan porang sebagai komoditas ekspor. Di pasar ekspor, porang banyak dicari sebagai bahan makanan dan industri obat juga kecantikan sehingga harga porang pun menjadi sangat menjanjikan bagi petani.

"Kami akan terus meningkatkan budidaya porang ini dalam berbagai aspek salah satunya dalam pengamanan produksi porang," ungkapnya.

Saat ini ada 20.000 hektare (ha) lahan di Indonesia yang ditanami porang dan terus bertambah. Porang ini sudah diekspor ke-16 negara dengan negara tujuan terbesar China, Thailand, dan Vietnam dalam bentuk chips, tepung dan lainnya. "Pada 2020, sebanyak 19.800 ton porang diekspor dengan nilai Rp880 miliar," katanya.

Suwandi juga meminta pihaknya agar terus mengawal dan menuntaskan masalah-masalah pertanian seperti hama dan serangan penyakit dengan melakukan upaya-upaya maksimal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan mengamankan produksi komoditas pertanian.

"Semua harus rajin turun ke lapangan, memantau dan mengamankan pertanaman. Lakukan sosialisasi cara yang benar pengendaliannya, supaya bisa memberikan faedah bagi petani sehingga kesejahteraan petani meningkat," ujarnya. **(tim humas)**





KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

0000000000

# Mentan Syahrul Yasin Limpo MELEPAS EKSPOR PERDANA ➔ PRODUK OLAHAN UNGGAS KE QATAR ➔

Acara pelepasan ekspor perdana produk olahan unggas dari PT. Charoen Pokphand Indonesia ke Qatar ini dihadiri secara virtual oleh Duta Besar RI untuk Qatar, Deputi Bidang Koord Pangan & Agribisnis, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kepala BPOM, Ketua Satgas Pangan, Ketua Komisi KPPU, serta jajaran Eselon I lingkup Kementan.

0000000000





Ekspor perdana produk olahan unggas ke Qatar ini sebanyak **3,29 ton** dengan nilai **Rp 220 juta**.



Total kontrak yang telah disepakati antara PT. Charoen Pokphand Indonesia dan pihak buyer di Qatar untuk tahun 2021, yaitu sebanyak **21,6 ton**.



Ekspor perdana ke Qatar ini menjadi pintu masuk produk-produk olahan unggas asal Indonesia ke kawasan Timur Tengah.



Dengan adanya pelepasan ekspor ini menjadi pemantik buat pelaku usaha lainnya untuk ikut menyukseskan **Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (GRATIEKS)**.

“ Saya bahagia dan berbangga hati bahwa kita melepas ekspor perdana produk olahan unggas Indonesia pertama yang berhasil menembus negara Qatar dari PT. Charoen Pokphand Indonesia. ”

**Syahrul Yasin Limpo**

Menteri Pertanian RI





KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# SELAMAT HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

## 8 MARET 2021

